KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

TAHUN 2024

FIGHT AGAINST X-CRIME

KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KERJA

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

TAHUN 2024

FIGHT AGAINST X-CRIME

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Aswin Bangun, S.Hut., M.Si.

Penanggungjawab :

Muhammad Amin, S.H., M.H.

Ketua :

Muhammad Amin, S.H., M.H.

Koordinator :

Akhyar, S.P.

Anggota :

Muh Fahrul, S.E.

Sahl Faqihuddin, S.T.

Kurnia

Disusun dan diterbitkan oleh :

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

Jl.Batara Bira No. 9 Baddoka Makassar, Sulawesi Selatan.

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI
NOMOR : SK.77/BPPHLHK.3/TU/REN.4.6/B/12/2023

T E N T A N G

RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2024

KEPALA BALAI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of all Form Dicrimination Against Women/CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencanqa Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

12. Undang-Undang ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2020 Tahun 209);
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719);
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.91263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.53/PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI TENTANG RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai ini.

KEDUA : Rencana ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KEDUA	:	Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Seksi Wilayah dan Pos GAKKUM lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2024.
KETIGA	:	Seksi Wilayah dan Pos GAKKUM lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi mengacu pada Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2024.
KEEMPAT	:	Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2024 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2024, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di tahun 2024.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 5 Desember 2023

KEPALA BALAI,

ASWIN BANGUN, S.Hut., M.Si.
NIP. 19740228 200003 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Seluruh pejabat struktural lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH
SULAWESI
NOMOR :
SK.77/BPPHLHK.3/TU/REN.4.6/12/2023
TENTANG
RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2024

RENCANA KERJA
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH SULAWESI TAHUN 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KATA PENGANTAR

RENCANA KERJA (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi (BPPHLHK Wilayah Sulawesi) Tahun 2024 ini merupakan dokumen yang berisi kinerja dan anggaran untuk mendukung harapan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) yaitu meningkatkan kondisi lingkungan hidup dan kehutanan menjadi semakin baik secara ekologi, sosial, ekonomi dan dalam hal tata kelola melalui Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya serta keberhasilan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi.

Rencana Kerja ini diharapkan mampu menjadi acuan penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2024. Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Desember 2023
Kepala Balai

ASWIN BANGUN, S.HUT., M.SI.

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

2 DAFTAR ISI

6 PENDAHULUAN

20 CAPAIAN SASARAN (Program & Anggaran)

79 RENCANA KERJA 2024

100 PENUTUP

DAFTAR HALAMAN

Bab	Uraian Halaman	Hal
	Kata Pengantar	1
I	**Pendahuluan**	6
A	Latar Belakang	7
B	Kedudukan Tugas dan Fungsi	9
	Visi dan Misi	10
	Tujuan Penegakan Hukum LHK	11
C	Struktur Organisasi	12
D	Sumber Daya Manusia	13
E	Sarana Prasarana	15
F	Pengarusutamaan Gender	16
G	Reformasi Birokrasi	17
II	**Prognosis dan Capaian Akuntabilitas Kinerja & Anggaran**	20
A	Capaian dan Prognosis Kinerja	21
B	Capaian dan Prognosis Anggaran	23
C	Akuntabilitas Kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi	24
III	**Rencana Kerja 2024**	79
	Strategi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Mendukung Prioritas Nasional	80
IV	**Penutup**	100

DAFTAR TABEL

Uraian Tabel	Hal
Data SDM Terpilah Sex Aggregated Data dan Tingkat Pendidikan (1 Desember 2023)	13
Data SDM Fungasional terpilah Sex Aggregated Data, Tingkat Pendidikan, Usia	14
Prognosis Target Kinerja Tahun 2023	22
Prognosis Target Kinerja Tahun 2023	23
Rencana Kerja Pemerintah TA 2024	88
Rencana Kerja Tahun 2024 per Program	96
Alokasi Anggaran per Wilayah	98

BAB I

PENDAHULUAN

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FIGHT AGAINST X-CRIME

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 mengusung tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan",** RKP Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta untuk menjaga kesinambungan kebijakan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Bagi pemerintah pusat, RKP merupakan acuan K/L dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bagi pemerintah daerah, RKP digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Sementara itu, RKP juga dapat menjadi acuan bagi badan usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* (NSA) untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (PN)

Berdasarkan Tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** dengan tetap menjaga stabilitas politik dalam menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mewujudkan Stabilitas di berbagai bidang Pembangunan yaitu sebagai pondasi bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang aman dan Kondusif. Percepatan Transformasi Ekonomi untuk Peningkatan kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan; Revitalisasi Industri dan Penguatan riset terapan serta Penguatan daya saing usaha, Untuk mendukung Pembangunan inklusif antaralain pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan Pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas dan percepatan Pembangunan Ibu Kota Negara. Penetapan tema ini mempertimbangkan arahan Presiden yakni hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika paradigma Pemerintah, serta konsistensi dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Demi mencapai Pembangunan Berkelanjutam, Pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi. Di tahun 2024 Isu dan tantangan Pembangunan disaat dunia Tengah menghadapi *triple planetary crisis* yang mengancam masa depan bumi dan manusia antara lain Perubahan Iklim, Hilangnya Keanekaragaman Hayati serta Polusi dan Kerusakan Lingkungan. Selain itu masih tingginya ketidakpastian seiring dengan tensi geopolitik yang masih berlangsung semakin mendorong risiko pada prospek ekonomi global kedepan.

Tantangan Pembangunan Nasional tahun 2024 yaitu *safe guarding* penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2020 s.d 2024, terutama Major Project. Tahun 2024 merupakan tahun politik, agenda pemilu dan masa transisi. Tahun 2024 menjadi landasan awal untuk penyusunan RPJMN 2025 s.d 2030. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKP Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun kelima dari pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan menjadi PN dalam RKP Tahun 2024. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kesinambungan RKP dengan RPJMN, serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan untuk mengawal pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Bagi Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yang terkait langsung dengan pencapaian Prioritas Nasional pada tahun 2024, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas yang telah ditetapkan

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

LANDASAN HUKUM	Peraturan Menteri LHK Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK	Peraturan Menteri LHK Nomor P.13 Tahun 2022 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TUGAS

"penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan"

FUNGSI

a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
c. sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
d. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
h. pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
i. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
j. pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
l. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Visi dan Misi :

VISI

"Terwujudnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkualitas dan berkeadilan demi keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat."

MISI

1. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif melalui sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, responsif, dan inovatif serta berkesetaraan gender
2. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan berbasiskan sains dan teknologi yang mengedepankan norma dan budaya hukum;
3. Penguatan ekosistem penegakan hukum LHK melalui pengembangan instrumen, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, kapasitas sumber daya manusia serta dukungan pengambilan keputusan;
4. Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang konsisten, bermartabat, dan terpercaya.

Tujuan

"Sebagai organisasi penegak hukum, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah naungan Ditjen Gakkum LHK juga memiliki tujuan esensial yang melandaskan organisasi ini berdiri dan mengakar pada tugas dan fungsi organisasi."

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia, inovasi, dan kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum serta keamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Meningkatnya kepercayaan dan partisipasi publik terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan

C. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI

Aswin Bangun, S.Hut., M.Si.

Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Muhammad Amin, S.H., M.H.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Abdul Waqqas, S.Sos.
Kepala Seksi Wilayah I
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Subagio, S.H., M.A.P.
Kepala Seksi Wilayah II
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

William D.T. Tengker, S.H., M.Hum.
Kepala Seksi Wilayah III
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

ESELON III | ESELON IV | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

D. SUMBER DAYA MANUSIA

188

Total Data Pegawai

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

Data per 1 Desember 2023

DATA TERPILAH		ASN PNS				PPPK	NON ASN					TOTAL	
		TU	SW I	SW II	SW III	TU	PPNPN				Alih Daya (OS)		
							TU	SW I	SW II	SW III			
SMP	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAKI LAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SMA	PEREMPUAN	0	5	0	2	0	0	0	0	0	1	8	73
	LAKI LAKI	0	35	9	10	0	3	0	2	1	5	65	
D3	PEREMPUAN	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	8
	LAKI LAKI	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
S1	PEREMPUAN	4	4	2	5	2	6	0	0	0	0	23	94
	LAKI LAKI	4	37	15	12	0	1	0	0	1	1	71	
S2	PEREMPUAN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13
	LAKI LAKI	2	6	3	1	0	0	0	0	0	0	12	
S3	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LAKI LAKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		13	91	30	31	2	10	0	2	2	7	188	
		165					14						

Tabel. Sebaran SDM Terpilah menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin (*Sex Aggregated Data*) terhadap ASN dan Non ASN.

Gambar. Total ASN dan NON ASN terpilah Range Usia dan Jenis Kelamin (*Sex Aggregated Data*).

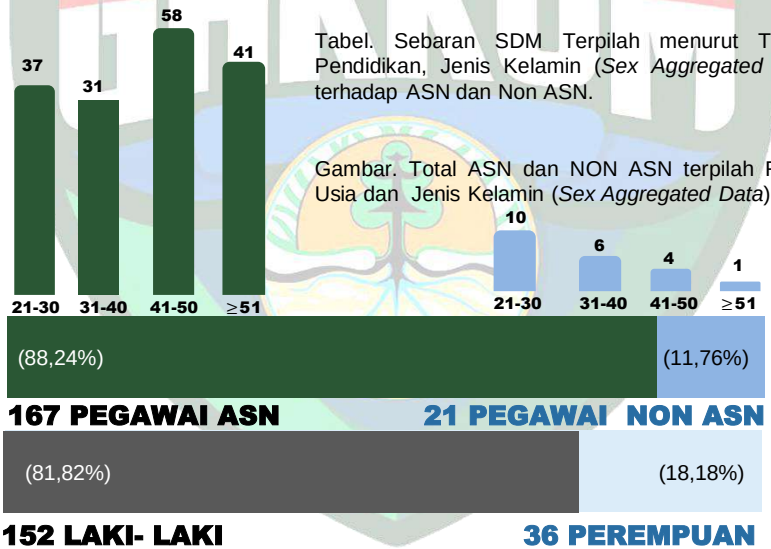

129 JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

99 POLHUT SPORC | **30 POLHUT**

Data Terpilah		Penempatan						Range Usia				TOTAL
JF Polisi Kehutanan		SW I Makassar	Pos Gakkum LHK Kendari	SW II Palu	Pos Gakkum LHK Mamuju	SW III Manado	Pos Gakkum LHK	≤ 30	31-40	41-50	51-65	
SMA	PEREMPUAN	5	0	0	0	1	1	10	5	20	26	**61**
	LAKI LAKI	26	9	7	2	6	4					
D3	PEREMPUAN	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	**5**
	LAKI LAKI	1	2	0	0	0	0					
S1	PEREMPUAN	1	1	1	0	1	1	6	15	27	7	**55**
	LAKI LAKI	18	13	5	4	7	3					
S2	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	**8**
	LAKI LAKI	4	0	3	0	1	0					
S3	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	LAKI LAKI	0	0	0	0	0	0					
Total		**55**	**25**	**17**	**6**	**17**	**9**	**20**	**20**	**53**	**36**	**129**
		129						**129**				

23 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Data Terpilah		Wilayah Kerja						Range Usia				TOTAL
JF Pengawas Lingkungan Hidup		SW I Makassar	Pos Gakkum LHK Kendari	SW II Palu	Pos Gakkum LHK Mamuju	SW III Manado	Pos Gakkum LHK	≤ 30	31-40	41-50	51-65	
S1	PEREMPUAN	2	0	1	0	1	2	12	5	1	0	**18**
	LAKI LAKI	4	2	2	2	2	0					
S2	PEREMPUAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	**5**
	LAKI LAKI	4	0	0	0	0	0					
S3	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	LAKI LAKI	0	0	0	0	0	0					
Total		**11**	**2**	**3**	**2**	**3**	**2**	**12**	**5**	**1**	**5**	**23**
		23						**23**				

49 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Data Terpilah		Wilayah Kerja						Range Usia				TOTAL
		SW I Makassar	Pos Gakkum LHK Kendari	SW II Palu	Pos Gakkum LHK Mamuju	SW III Manado	Pos Gakkum LHK Gorontalo	≤ 30	31-40	41-50	51-65	
POLISI KEHUTANAN												
SMA	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	**5**
	LAKI LAKI	1	0	0	0	3	0					
S1	PEREMPUAN	1	1	0	0	0	0	0	8	13	6	**27**
	LAKI LAKI	13	3	2	3	4	0					
S2	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	**8**
	LAKI LAKI	4	0	3	0	1	0					
PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP												
S1	PEREMPUAN	0	0	0	0	0	1	3	2	1	0	**6**
	LAKI LAKI	1	1	2	1	0	0					
S2	PEREMPUAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	**3**
	LAKI LAKI	2	0	0	0	0	0					
Total		**23**	**5**	**7**	**4**	**8**	**2**	**3**	**10**	**23**	**13**	**49**
		49						**49**				

E. SARANA PRASARANA

Kondisi Total per 5 Desember 2023

	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
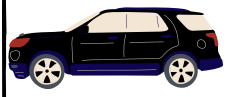 Mobil Patroli/Intelijen	26	2	2	30
Mobil Laboratorium	1	0	0	1
Mobil Tahanan	1	0	0	1
Motor Patroll	61	0	0	61
Drone (Kamera Udara)	15	6	4	25
GPS	19	0	6	25
Laptop	105	2	2	109
Senjata Api	39	0	0	39

F. PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terdapat **4 (empat)** Prioritas dan Sasaran Road Map Pengarusutamaan Gender (PUG) BPPHLHK Wilayah Sulawesi TA 2020 s.d 2024.

Peningkatan Kapasitas Staff untuk Mengimplementasikan *Practical Gender Concern*

- Meningkatkan pengetahuan tentang **konsep gender dan penghapusan stereotip gender** dikalangan Ditjen Gakkum LHK
- Memastikan pemahaman bersama mengenai **kesetaraan gender** melalui perubahan kelembagaan serta implikasinya dan **komitmen terhadap anti pelecehan dan eksploitasi seksual baik itu verbal maupun nonverbal/**

Mewujudkan **Lingkungan Kerja yang Sensitif Gender**

- **Fasilitas yang Responsif Gender** di lingkungan kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi misalnya parkiran khusus dengan tagging warna pink dan toilet dengan membedakan antara toilet laki-laki dan toilet perempuan.

Pengarusutamaan Gender dalam **Reformasi Kebijakan dan Peraturan**

- Pengembangan **kebijakan dan peraturan** dalam kerangka **yang responsif gender** dalam lingkungan Dijen Gakkum LHK
- Pembentukan Sistem dan Mekanisme Pengaduan yang responsif Gender

Monitoring dan Evaluasi yang Responsif Gender

- **Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang responsif** gender yang dapat menggambarkan manfaat program dan dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki

I. REFORMASI BIROKRASI

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

8 (Delapan) Area Perubahan pada Pembangunan reformasi birokrasi Ditjen Gakkum LHK diarahkan untuk lebih mengukuhkan transformasi birokrasi sebagai institusi publik yang modern dengan mengedepankan mesin birokrasi yang kapabel, bersih, akuntabel serta mampu memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat.

Peraturan Presiden
Nomor 8 Tahun 2010

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025

Peraturan Menteri PAN RB
Nomor 25 Tahun 2020

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TA 2020 S.D 2024

Keputusan Menteri LHK
Nomor 374 Tahun 2020

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KLHK TA 2020 S.D 2024

Instruksi Menteri LHK
Nomor 1 Tahun 2015

PEMBANGUNAN ZI WBK WBBM KLHK

Keputusan Direktur Jenderal
PH LHK Nomor 15 Tahun 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI BPPHLHK WILAYAH SULAWESI TA 2024

- MANAJEMEN PERUBAHAN
- DEREGULASI KEBIJAKAN
- PENATAAN ORGANISASI KELEMBAGAAN
- PENATAAN TATA LAKSANA
- SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
- PENGUATAN AKUNTABILITAS
- PENGAWASAN
- PELAYANAN PUBLIK

KINERJA PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI

Perubahan paradigma pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) terjadi di medio tahun 2023, di mana Kementerian PANRB melahirkan terobosan berupa dua fokus pelaksanaan RB. Dua fokus yang dikenal dengan 'double track' ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Oleh karenanya, per tahun 2023 kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan (sesuai Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020), melainkan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*) (Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023).

Kementerian LHK berperan serta menyelesaikan 4 dari 4 program prioritas nasional yang termaktub sebagai sektoral RB Tematik tahun 2020-2024, di mana untuk pelaksanaannya ditunjuk beberapa unit eselon I sebagai koordinator (*leading unit).* Sementara terhadap pembangunan RB General, terhadap 18 indeks yang menjadi indikator capaian implementasinya yang dibebankan (*cascade*) kepada unit kerja terpilih dan/atau seluruh unit kerja lingkup Kementerian LHK.

RB General
RB memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah (*problem hulu*)

- Tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif
- Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN profesional

RB Tematik
RB mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional (*problem hilir*)

INDIKATOR CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL

Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi
Transformasi Layanan Digital	Tingkat Maturitas SPIP
Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai SAKIP
Indeks Perencanaan Pembangunan	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
Tingkat Digitalisasi Arsip	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Indeks Pengelolaan Aset	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) Yang Diseleselesaikan
Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks Reformasi Hukum
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Tata Kelola Pengadaan
Indeks Sistem Merit	Indeks Pelayanan Publik

BAB II

PROGNOSIS & CAPAIAN

AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

FIGHT AGAINST X-CRIME

A. PROGNOSIS DAN CAPAIAN KINERJA

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi telah melaksanakan berbagai tindakan penegakan hukum secara konsisten yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk meningkatkan budaya ketaatan dari pelaku usaha dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi konstitusional bagi setiap warga Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia sebagai penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Seiring tahun terakhir RPJMN 2020 s.d 2024, sesuai Permen LHK P.51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mencantumkan Capaian T-1 dan Prognosis di tahun berjalan (Tahun 2023).

.

PROGNOSIS TARGET KINERJA TAHUN 2023

Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	Target Rencana Kerja TA 2023		
		Awal	Top Up PNBP	Prognosis 2023
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	QHD-Operasi Bidang Keamanan	3	7	24*
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	QHD-Operasi Bidang Keamanan	4	6	15*
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	15	20	131
001-Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	87	90	99*
001-PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	10	10	33
001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	QCE-Penanganan Perkara	28	30	32*
001-PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	5	5	11
001- Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	QCE-Penanganan Perkara	0	2	3*
962 - Layanan Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	1
994- Layanan Perkantoran	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	1
951 - Layanan Sarana Internal	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1

** Angka belum pasti*

B. PROGNOSIS DAN CAPAIAN ANGGARAN

PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	PROGNOSIS SERAPAN	% PROGNOSIS SERAPAN
48.250.209.000	40.276.553.169	7.973.655.831	48.226.083.896	99,95%

*Data Per 1 Desember 2023

Wilayah Kerja/ Rincian Output	Pagu Anggaran 2023	Realisasi Anggaran 2023	Sisa Anggaran
SW I	**5.648.633.000**	**5.167.557.864**	**481.075.136**
5428.DCE.001-Peningkatan Kapasitas POLHUT	116.090.000	115.665.750	424.250
5428.QHD.001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	2.070.740.000	1.946.078.550	124.661.450
5428.QHD.002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	890.201.000	810.704.360	79.496.640
5430.QIH.001-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	186.722.000	160.563.680	26.158.320
5431.QCE.001-Penanganan Perkara Pidana Bidang LHK	2.384.880.000	2.134.545.524	250.334.476
SW II	**2.533.063.000**	**1.828.865.619**	**704.197.381**
5427.EBB.951-Dukungan Manajemen (Layanan Sarana Internal)	238.878.000	129.650.800	109.227.200
5428.DCE.001-Peningkatan Kapasitas POLHUT	47.991.000	47.988.600	2.400
5428.QHD.001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	519.450.000	396.709.700	122.740.300
5428.QHD.002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	324.345.000	241.660.300	82.684.700
5430.QIH.001-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	406.689.000	324.779.251	81.909.749
5431.QCE.001-Penanganan Perkara Pidana Bidang LHK	995.710.000	688.076.968	307.633.032
SW III	**3.007.185.000**	**2.286.049.841**	**721.135.159**
5427.EBB.951-Dukungan Manajemen (Layanan Sarana Internal)	591.935.000	179.946.340	411.988.660
5428.DCE.001-Peningkatan Kapasitas POLHUT	43.676.000	43.668.750	7.250
5428.QHD.001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	517.910.000	443.170.000	74.740.000
5428.QHD.002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	366.214.000	315.263.950	50.950.050
5430.QIH.001-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	326.226.000	323.793.781	2.432.219
5431.QCE.001-Penanganan Perkara Pidana Bidang LHK	1.161.224.000	980.207.020	181.016.980
TU	**37.061.328.000**	**30.994.079.845**	**6.067.248.155**
5427.EBA.962-Dukungan Manajemen (Layanan Umum)	1.764.190.000	1.563.597.238	200.592.762
5427.EBA.994-Dukungan Manajemen (Layanan Perkantoran)	25.506.944.000	22.251.592.665	3.255.351.335
5427.EBB.951-Dukungan Manajemen (Layanan Sarana Internal)	1.623.576.000	1.555.969.758	67.606.242
5428.DCE.001-Peningkatan Kapasitas POLHUT	292.243.000	289.410.544	2.832.456
5428.QHD.001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	255.100.000	252.500.834	2.599.166
5428.QHD.002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1.084.303.000	986.567.231	97.735.769
5429.QCE.001-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	700.000.000	519.338.955	180.661.045
5430.DCE.001-Peningkatan Kapasitas PPLH	100.000.000	97.111.713	2.888.287
5430.QIH.001-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	2.230.363.000	1.735.229.334	495.133.666
5431.DCE.001-Peningkatan Kapasitas PPNS	20.000.000	19.318.482	681.518
5431.QCE.001-Penanganan Perkara Pidana Bidang LHK	3.484.609.000	1.723.443.091	1.761.165.909
Grand Total	**48.250.209.000**	**40.276.553.169**	**7.973.655.831**

Serapan anggaran BPPHLHK Wilayah Sulawesi diprognosiskan ±99,95% dari total pagu anggaran. Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran sebesar 83,47% per 1 Desember 2023 BPPHLHK Wilayah Sulawesi melakukan revisi anggaran antar output untuk merealokasikan anggaran ke output yang memiliki urgensi lebih tinggi untuk diselesaikan.

C. AKUNTABILITAS KINERJA BPPHLHK WILAYAH SULAWESI

** Prognosis Akhir Tahun 2023*

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungwaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran kinerja dapat juga dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Renstra Lembaga. Pencapaian kinerja sasaran strategis pada hakikatnya merupakan hasil pengukuran terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2023.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi dengan Direktur Jenderal PHLHK terdapat 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang diemban oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Hasil Pengukuran, capaian kinerja sesuai IKK BPPHLHK Wilayah Sulawesi, sebagaimana tersaji sebagai berikut:

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Pengukuran efektivitas capaian kinerja sasaran Tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan Capaian kinerja fisik tahun berjalan dengan capaian kinerja Tahun 2022. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2023.

$$\text{Efektivitas Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Berjalan}}{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Sebelumnya}}$$

Kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rasio perbandingan > 1 dikategorikan sebagai efektif, artinya terjadi peningkatan efektivitas pencapaian kinerja dbandingkan kinerja tahun sebelumnya;
2. Rasio perbandingan = 1 dikategorikan sebagai efektif, namun tidak terjadi perubahan pencapaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya;
3. Rasio perbandingan < 1 dikategorikan sebagai tidak efektif, artinya terjadi penurunan efektivitas pencapaian kinerja dibandingkan kinerja tahun sebelumnya.

Pengukuran efisiensi capaian kinerja sasaran Tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan dengan capaian kinerja (fisik) tahun berjalan dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2023. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2023.

$$\text{Efesiensi Capaian Kinerja} = \frac{\text{Capaian Kinerja Fisik Tahun Berjalan}}{\text{Capaian Kinerja Keuangan Tahun Berjalan}}$$

Kriteria yang digunakan untuk mengukur efetivitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rasio perbandingan > 1 atau = 1 berarti bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efsien;
2. Rasio perbandingan < 1 berarti bahwa penggunaan anggaran tidak efsien.

1 IKK JUMLAH OPERASI PENGAMANAN HUTAN DAN PENINDAKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK), tugas Balai PPHLHK yaitu melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan salah satu fungsinya yaitu pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan.

Target dan Realisasi Kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

Target jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebanyak 7 Operasi. Tahun 2023, capaian IKK telah berhasil melaksanakan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan sebanyak **24 operasi** dari **7 operasi** yang ditargetkan atau **120%.**

Kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan tersebut berhasil mengamankan kawasan hutan meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi serta Kawasan Lain yang berada dalam wilayah pelayanan BPPHLHK Wilayah Sulawesi seluas 303.824 Hektar.

Target dan Realisasi Anggaran Kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022-2023

Capaian kinerja jumlah operasi pengamanan kawasan hutan pada Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu 7 Operasi dan realisasi kegiatan operasi pengamanan kawasan hutan yang berhasil dilaksanakan yaitu 24 Operasi. Jumlah operasi pengamanan kawasan hutan pada Tahun 2023 tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2022 yang mencapai 31 Operasi dengan target awal kegiatan yaitu 4 operasi.

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, secara kumulatif total target kinerja kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan sebanyak 30 Operasi. Capaian kinerja kumulatif BPPHLHK Wilayah Sulawesi hingga Desember 2023 adalah sebanyak 143 Operasi dan jumlah tersebut telah mencapai bahkan melampaui target pada Renstra untuk Tahun 2023 yaitu sebanyak 27 operasi atau 120%%.

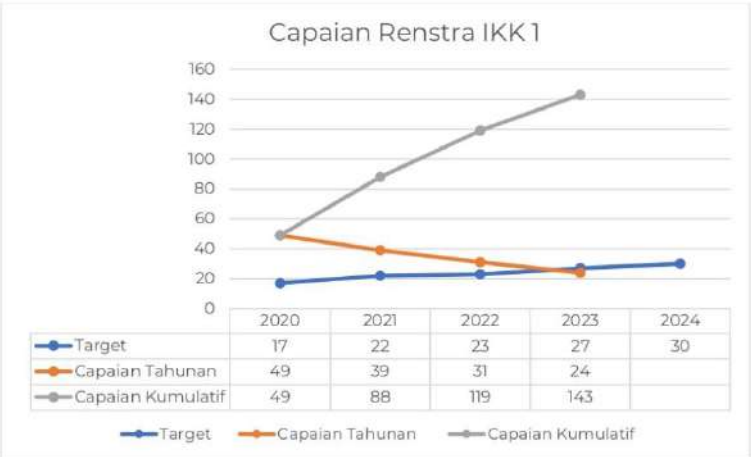

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	17	22	23	27	30
Capaian Tahunan	49	39	31	24	
Capaian Kumulatif	49	88	119	143	

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Keberhasilan

Kegiatan operasi pengamanan kawasan hutan dapat mencapai target dikarenakan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Hasil operasi yang dilakukan merupakan upaya dan komitmen terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat merusak komponen sumber alam diwilayah Sulawesi.
2. Masyarakat ikut andil dalam mendukung kawasan hutan yang terbebas dari ancaman gangguan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup

3. Kinerja dan kecekatan Tim Puldasi dalam mendeteksi, menganalisis dan menyajikan data dan informasi ancaman kejahatan TSL (keanekaragaman hayati dalam kawasan dan perusakan hutan kepada pimpinan dalam rangka pencegahan dan pengamanan hutan.
4. Peran aktif dan keterlibatan Lembaga Non Pemerintah untuk memberikan informasi dan data ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi dan media sosial terkait adanya informasi mengenai gangguan keamanan kawasan hutan.

Hambatan

Meskipun capaian target IKK jumlah operasi pengamanan kawasan hutan dinilai telah memenuhi target, namun secara subtantif maupun teknis dalam pelaksanaan masih menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Dalam Operasi Pengamanan hutan membutuhkan pra kondisi yang cukup memakan waktu antara lain koordinasi yang melibatkan banyak instansi dan adanya isu-isu sosial lainnya, sehingga ada kegiatan yang kegiatan yang tidak sesuai dengan tata waktu
2. Tenaga pengamanan hutan, terutama Polhut dan SPORC sangat terbatas bila dibandingkan dengan permasalahan, luas kawasan hutan dan kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang ada.

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis kebehasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2023, yaitu antara lain:

1. Melakukan pendataan secara lengkap terhadap lokasi yang terpantau sebagai prioritas tipihut sehingga dapat menjadi bahan pengambilan keputusan terkait metode penanganan
2. Peningkatan Kapasitas tenaga pengamanan hutan terutama SPORC dan Polisi Kehutanan

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 1

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	631.421.000	631.374.854	99,97
Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	2.185.573.000	2.185.062.250	99,99
Operasi Penyelamatan SDA	546.206.000	546.025.080	99,99
Total	**3.363.200.000**	**3.362.462.184**	**99,97**

Prosentase Realiasi Anggaran	99,98%	**1,20**	**Efisien**
IKK (Input)		Efisiensi IKK 1	Kategori
Prosentase capaian IKK 1 (Output)	120,00%		

Operasi Gabungan melibatkan para *stakeholder* bersangkutan

TAHUN 2023

Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

SENIN, 13 NOVEMBER 2023

SIKAT TAMBANG NIKEL ILEGAL DI KOLAKA SULTRA, GAKKUM KLHK TAHAN DIREKTUR DAN KOMISARIS PT. AG DAN SITA 17 EXCAVATOR

KLHK selama beberapa tahun ini telah melakukan 2.016 Operasi Pengamanan Hutan, Pembalakan liar dan TSL serta membawa 1.449 kasus ke pengadilan (P-21).

GAKKUM SULAWESI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan dua pengurus PT AG sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana menambang nikel ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara di Desa Oko-Oko, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (13/11/2023).
Tersangka tersebut ialah LM (28) selaku Direktur PT AG dan AA (26) selaku Komisaris PT AG. Keduanya beralamat di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Kedua Tersangka LM dan AA ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2A Kendari.

Barang bukti sebanyak 17 (tujuh belas) unit alat berat Excavator PC 200 telah disita dan dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kendari.

Penyidik menjerat kedua Tersangka dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani

"PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERLAPIS TERMASUK TPPU DILAKUKAN DISAMPING UNTUK MENINGKATKAN EFEK JERA TERHADAP PENERIMA MANFAAT UTAMA (BENEFICIARY OWNERSHIP) DARI KEJAHATAN INI. UPAYA INI UNTUK MEMULIHKAN KERUGIAN LINGKUNGAN DAN KERUGIAN NEGARA. DARI KASUS-KASUS TAMBANG ILLEGAL YANG TELAH DITINDAK SELAMA INI, PENGENAAN PIDANA POKOK BERUPA PIDANA PENJARA DAN DENDA SEMATA, TAMPAKNYA BELUM CUKUP MEMBERIKAN EFEK JERA. PENGENAAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN KEUNTUNGAN DAN TPPU MENJADI PRIORITAS KAMI AGAR BENAR-BENAR DAPAT MENIMBULKAN EFEK JERA," TEGAS RASIO SANI.

2 IKK JUMLAH OPERASI PEMBALAKAN LIAR, TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Tipologi gangguan yang menyangkut kawasan hutan dan hasil hutan yaitu kejahatan TSL dan perusakan hutan. Kejahatan TSL tersebut terdiri dari perburuan satwa liar, perdagangan TSL baik secara online maupun konvensional (transaksi langsung) dan pemeliharaan TSL illegal.

Operasi pembalakan liar, Peredaran hasil hutan meliputi penanganan pembalakan liar, peredaran hasil hutan kayu illegal, perburuan satwa liar dan peredaran TSL. Pada tahun 2023, BPPHLHK Wilayah Sulawesi melaksanakan Operasi peredaran ini yang telah berkonstribusi dalam penyelamatan potensi kehilangan asset negara sebagai upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta perbaikan tata Kelola hasil hutan.

Target IKK 2	Realisasi IKK 2	Anggaran IKK 2	Realisasi Anggaran IKK 2
6 Operasi	15 Operasi	2, 665,063,000	2,664,162,526
Prosentase Realisasi IKK 2 **120,00 %**		Prosentase Anggaran IKK 2 **99,97%**	

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Target Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan satwa liar berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebanyak 6 Operasi. Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan satwa liar pada tahun 2023 dilaksanakan guna melestarikan keanekaragaman hayati. Capaian IKK telah berhasil melaksanakan giat Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan satwa liar sebanyak 15 Operasi atau 120% dari 6 Operasi yang ditargetkan. Melalui pelaksanaan giat operasi tersebut berhasil menyelamatkan 134.387 m3 kayu yang tak berdokumen dan diduga berasal dari kawasan hutan dan satwa liar sejumlah 28 ekor satwa.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022-2023

Capaian kinerja jumlah operasi pembalakan liar, Tumbuhan dan Satwa Liar pada tahun 2023 berdasarkan perjanijan kinerja tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2022), yaitu sebanyak 15 Operasi pembalakan liar, Tumbuhan dan Satwa Liar diwilayah kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Pelaksanaan Pencegahan dan pengendalian pengrusakan hutan beserta keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan. Pada tahun 2023 dilaksanakan operasi pembalakan liar dan TSL di lokasi-lokasi strategis lainnya seperti pelabuhan, bandara, dan lokasi transit lainnya di Seluruh Wilayah Sulawesi. Secara kumulatif total capaian pelaksanaan jumlah operasi pengamanan Kawasan hutan dari target renstra 2020 – 2024 sebanyak 75 Operasi. Capaian kinerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi hingga Desember 2023 adalah sebanyak 83 Operasi atau 110,66%.

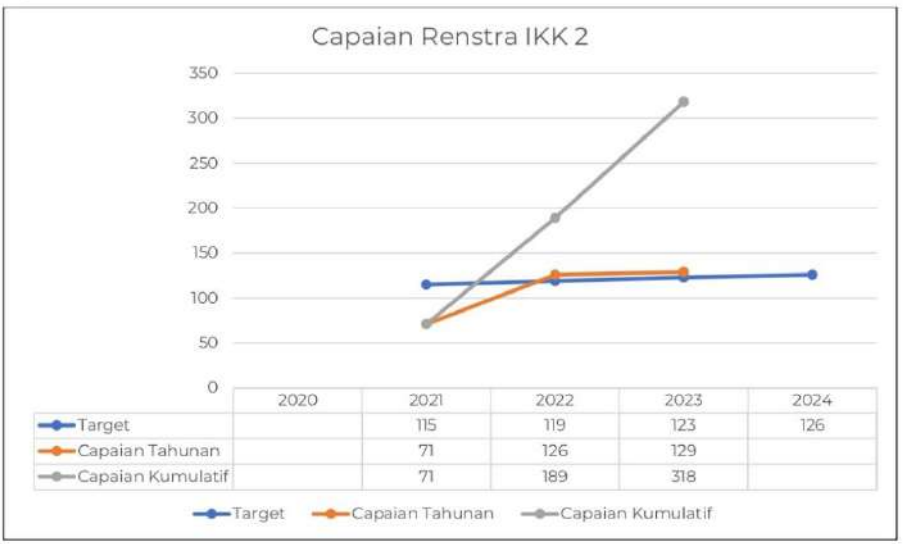

	2020	2021	2022	2023	2024
Target		115	119	123	126
Capaian Tahunan		71	126	129	
Capaian Kumulatif		71	189	318	

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Keberhasilan

Kinerja pada IKK Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar pada tahun 2023 dapat mencapai target dikarenakan faktor sebagai berikut:

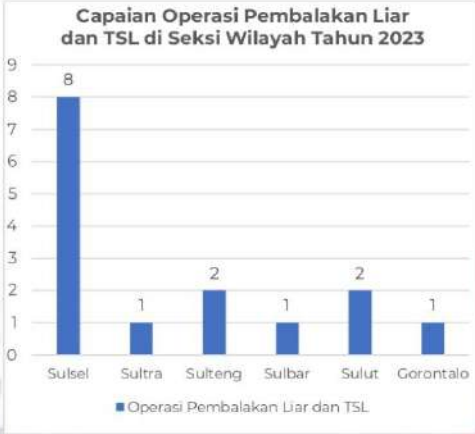

1. Peran Pimpinan terutama Kepala Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi yang senantiasa memberikan arahan dan trigger kepada petugas pengamanan Polhut dan SPORC untuk menindak tegas setiap pelaku tindak pidana di dalam dan luar kawasan hutan.
2. Kinerja dan kecekatan Tim Puldasi dalam mendeteksi, menganalisis dan menyajikan data dan informasi peredaran hasil hutan dan satwa liar kepada pimpinan dalam rangka pencegahan dan pengamanan hutan.
3. Tingginya animo masyarakat untuk menyampaikan pengaduan tentangkejahatan TSL dan pengrusakan lingkungan yang terjadi di wilayah kerja BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

Hambatan

Meskipun capaian target IKK Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar dinilai telah memenuhi target, namun secara subtantif maupun teknis dalam pelaksanaan masih menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Semakin meningkatnya modus kejahatan TSL dan maraknya pengrusakan hutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai untuk melaksanakan operasi peredaran TSL untuk mengungkap dengan cepat pelaku-pelaku kejahatan.
2. Tenaga pengamanan hutan, terutama Polhut dan SPORC masih terbatas baik secara kuantitias maupun peningkatan Skill yang dimiliki bila dibandingkan dengan kompleksitas kejahatan TSL dan kasus-kasus tindak pidana kehutanan yang ada.

UPAYA TINDAK LANJUT

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu antara lain:

1. Untuk optimalisasi pelaksanaan operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar perlu mengupayakan percepatan pelaksanaan pencairan dan ketersediaan dana agar implementasi kegiatan dapat dilakukan secara tepat waktu sesuai penjadwalan yang telah direncanakan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penanganan kejahatan TSL yang yang semakin masif dengan berbagai modus.
3. Perlu kajian komprehensifuntuk menentukan titik-titik rawan terjadinya peredaran hasil hutan dan TSL illegal.

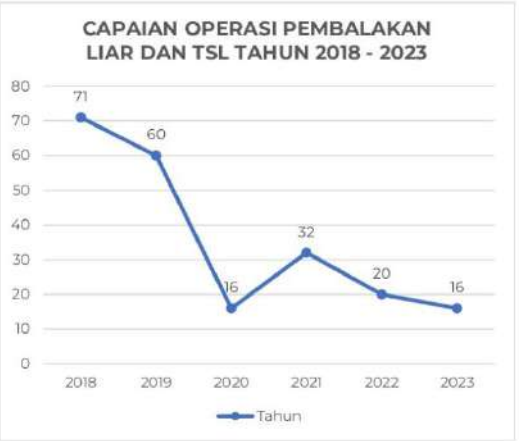

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 2

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	411.940.000	411.712.220	99,94%
Operasi Pembalakan Liar	1.106.762.000	1.106.751.954	100,00%
Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	384.893.000	384.891.931	100,00%
Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	188.145.000	188.122.429	99,99%
Penguatan Sistem Intelijen	510.000	-	0,00%
Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	760.958.000	760.806.421	99,98%
TOTAL	**2.853.208.000**	**2.852.284.955**	**99,96%**

Prosentase Realiasi Anggaran IKK (Input)	99,97%	**1,20** Efisiensi IKK	**Efisien** Kategori
Prosentase capaian IKK 2 (Output)	120%		

3 IKK JUMLAH POLHUT YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA

Tantangan kompleksitas kejahatan kehutanan yang tinggi, menuntut tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dibidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Peningkatan Kapasitas POLHUT (Polhut dan SPORC) lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan rutin berupa pelatihan menembak yang diikuti oleh Polhut. Melalui pelatihan menembak ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan menembak setiap Polhut.

Target IKK 3	Realisasi IKK 3	Anggaran IKK 3	Realisasi Anggaran IKK 3
35 Orang	131 Orang	500.000.000	499.959.844
Prosentase Realisasi IKK 3 **120,00 %**		Prosentase Anggaran IKK 3 **99,99%**	

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Target Peningkatan Kapasitas Polhut berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah sebanyak 35 Orang.

Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan pada tahun 2023 dilaksanakan guna meningkatkan keterampilan serta memiliki integritas dan mengedepankan humanis dalam bekerja. Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya sejumlah 131 orang, maka dengan kata lain dapat dikatakan pencapaian realisasi kinerja yang dimaksud adalah sebesar 120,00%.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022-2023

Capaian kinerja jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2023, berdasarkan perjanjian kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun lalu (2022), yaitu sebanyak 131 orang Polhut lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Pelaksanaan peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan pada Tahun 2023 dilaksanakan oleh seluruh Polhut dan SPORC lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi. Secara kumulatif total capaian pelaksanaan jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya pada target Renstra 2020 – 2024 sebanyak 123 Orang.

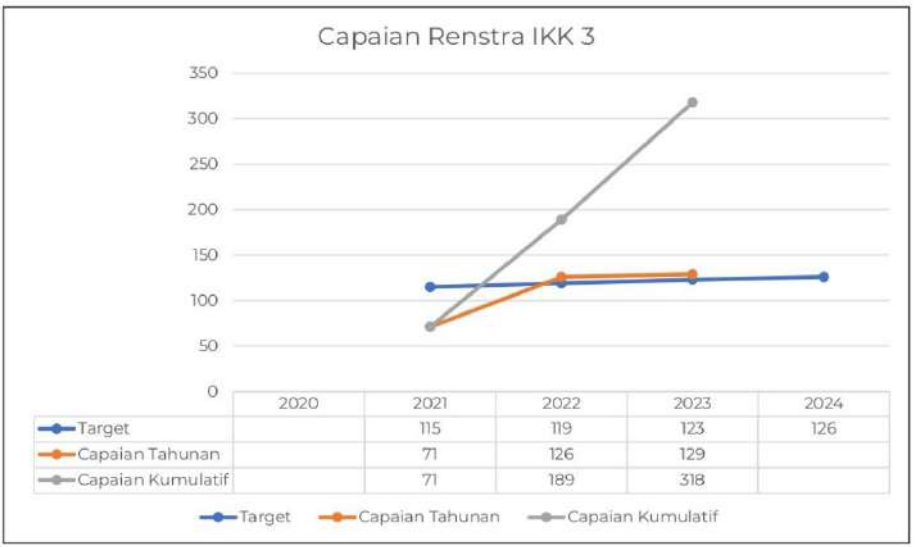

	2020	2021	2022	2023	2024
Target		115	119	123	126
Capaian Tahunan		71	126	129	
Capaian Kumulatif		71	189	318	

Selain peningkatan kapasitas berupa menembak bagi Polhut yang rutin dilaksanakan setiap tahun, pada tahun 2023 juga Polhut BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah mengikuti peningkatan kapasitas Polhut lainnya yang mendukung pencapaian IKK Peningkatan Kapasitas POLHUT melalui kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Polhut	Lokasi Kegiatan
1.	Pelatihan Menembak bagi Polhut Seksi Wilayah I	26 Juni 2023 dan 20 Juli 2023	73 Orang	SPN Batua Makassar dan SPN Anggotoa Kab. Konawe
2.	Pelatihan Menembak bagi Polhut Seksi Wilayah II	13 Juni 2023	25 Orang	SPN Polda Sulawesi Tengah Kab. Donggala
3.	Pelatihan Menembak bagi Polhut Seksi Wilayah III	6 Juli 2023	26 Orang	Lap. Extc Brimob Polda Sulawesi Utara
4.	Pendidikan dan Pelatihan Reguler Polisi Kehutanan Tahun 2023	Oktober s.d November	7 Orang	Sekolah Pembentukan Perwira POLRI Sukabumi

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Keberhasilan

Kinerja pada IKK Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2023 dapat mencapai target dikarenakan semakin masifnya permasalahan kasus kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan mendorong Polhut lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi untuk lebih meningkatkan keahlian sehingga lebih berkompeten dalam menindaki permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Hambatan

Meskipun capaian target IKK Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya dinilai telah memenuhi target, namun secara subtantif maupun teknis dalam pelaksanaan masih menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Polhut yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

2. Kompetensi Polhut lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi belum merata sehingga terkendala dalam penyelesaian penanganan berbagai tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Anggaran peningkatan kapasitas Polhut yang terbatas.

Pelatihan Menembak Seksi Wilayah I Makassar

Pelatihan Menembak Seksi Wilayah II Palu

Pelatihan Menembak Seksi Wilayah III Manado

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu antara lain:

1. Melakukan upaya peningkatan kapasitas Polhut melalui berbagai pelatihan sehingga tantangan terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dapat lebih cepat tertangani.
2. Pengadaan sarana dan prasarana yang lebih canggih sesuai dengan tuntutan di era digital seperti saat ini.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 3

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase
Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	500.000.000	499.959.844	99,99%
TOTAL	**500.000.000**	**499.959.844**	**99,99%**

Prosentase Realiasi Anggaran IKK (Input)	99,99%	**1,20**	**Efisien**
Prosentase capaian IKK 3 (Output)	120%.	Efisiensi IKK	Kategori

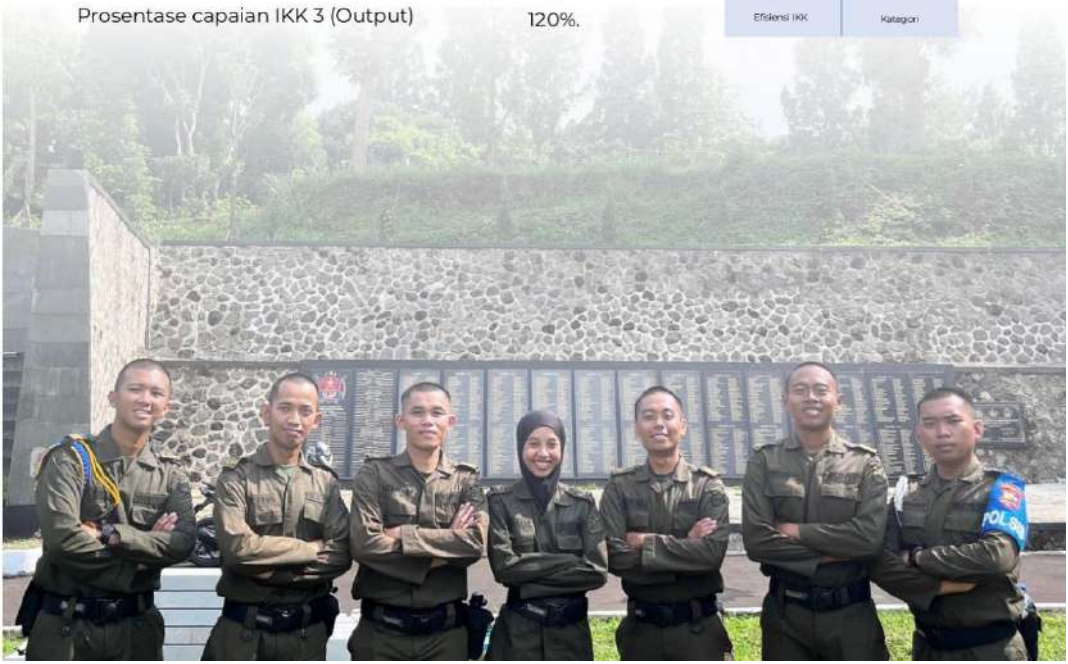

4 IKK JUMLAH PERKARA SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP YANG DISELESAIKAN MELALUI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN

Penyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) melalui pengadilan dan di luar pengadilan merupakan output yang awalnya dilaksanakan oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK. Namun pada Tahun 2023 BPPHLHK Wilayah Sulawesi mendapatkan target baru untuk melaksanakan PSLH melalui pengadilan dan di luar pengadilan dengan target 2 perkara yang diselesaikan. PSLH melalui pengadilan dan di luar pengadilan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari aktivitas/kegiatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat.

Target IKK 4	Realisasi IKK 4	Anggaran IKK 4	Realisasi Anggaran IKK 4
2 Perkara	3 Perkara	Rp 700.000.000	Rp 694.840.490
Prosentase Realisasi IKK 4		**Prosentase Realisasi Anggaran IKK 4**	
120%		99,26%	

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

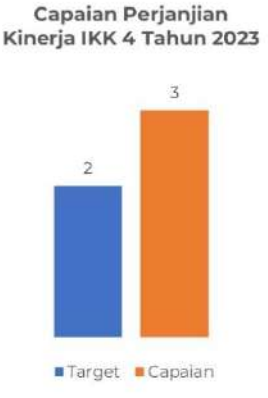

BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 mampu menyelesaikan **3 Perkara** Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan di luar pengadilan dari target IKK dalam Perjanjian Kerja 2023 sebanyak **2 Perkara** atau sekitar **120%**. Pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilakukan kegiatan PSLH, sehingga dengan tercapainya target IKK 4 pada tahun 2023 dapat menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan PSLH melalui pengadilan dan di luar pengadilan kedepannya di BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

Perkara yang berhasil diselesaikan BPPHLHK Wilayah Sulawesi yaitu:

No	Perkara	Penggugat	Tergugat	Penyelesaian	Kesepakatan Ganti Rugi
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat kandasnya kapal dan tumpahnya ore nikel dari BG LL 2712 di Perairan Desa Ulu Sawa, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara	Kelompok Nelayan Desa Ulu Sawa	PT. IM	Fasilitasi PSLH di Luar Pengadilan	Rp 370.988.562
2		Kelompok Nelayan Pokdakan Mitra Usaha			Rp 136.095.005
3		Kelompok Nelayan Camar Laut, Desa Tanjung Laimeo			Rp 62.984.076

Verfikasi Sengketa Lingkungan Hidup

Sosialisasi Fasilitasi Sengketa Lingkungan Hidup

Fasilitasi Pertemuan PSLH antara Masyarakat dengan Perusahaan

Kesepakatan Fasilitasi PSLH antara Masyarakat dengan Perusahaan

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Keberhasilan

Kinerja pada IKK 4 yaitu jumlah perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan pada tahun 2023 dapat mencapai target dikarenakan faktor sebagai berikut:

1. Pendampingan langsung dari Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang sangat membantu dalam membimbing dan mengarahkan proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang baik.
2. Kinerja ASN BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam melakukan fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang baik.

Hambatan

Dalam proses pencapaian target IKK 4 yaitu jumlah perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan terdapat beberapa kendala baik kendala subtantif maupun teknis yang dialami, yaitu antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memahami proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
2. Proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang cukup lama karena harus melalui beberapa kali pertemuan.

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu antara lain:

1. Meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia yang memahami proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan.
2. Memperbanyak kegiatan *sharing session* untuk membuka wawasan terkait Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 4

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	235.969.000	230.876.220	97,84%
Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat	-	-	
Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	464.031.000	463.964.270	99,99%
Total	**700.000.000**	**694.840.490**	**99,26%**

Prosentase Realiasi Anggaran	99,26%	**1,20**	**Efisien**
IKK (Input)		Efisiensi IKK 4	Kategori
Prosentase capaian IKK 4 (Output)	120 %		

5 IKK JUMLAH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LHK

Target IKK 5	Realisasi IKK 5	Anggaran IKK 5	Realisasi Anggaran IKK 5
90 Badan Usaha	99 Badan Usaha	Rp 3.150.000.000,00	Rp 3.148.820.917,00
Prosentase Realisasi IKK 5		**Prosentase Realisasi Anggaran IKK 5**	
110%		99,96%	

BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 mampu mencapai **99 Badan Usaha** yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK atau sekitar **110%** dari target IKK dalam Perjanjian Kerja 2023 sebanyak 90 Badan Usaha. Kegiatan yang yang mendukung IKK ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pengawasan pelaksanaan sanksi administrasi dan penanganan pengaduan perusahaan.

Output Kegiatan	Komponen Kegiatan	Realisasi
Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Pengawasan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29 Badan Usaha
	Pengawasan Pelaksanaan Sanksi Administrasi	33 Badan Usaha
	Penanganan Pengaduan Perusahaan	37 Badan Usaha
	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	31 Non Perusahaan
Total		**99 Badan Usaha**

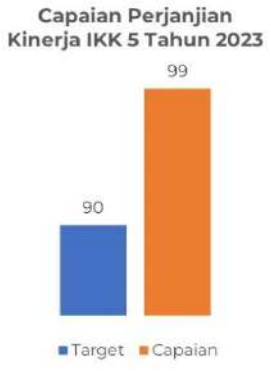

Pengawasan ketaatan Badan Usaha terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK sebanyak 62 Badan Usaha baik melalui pengawasan reguler maupun pengawasan pelaksanaan sanksi administrasi. Hasil dari pengawasan sebanyak **11 Badan Usaha berstatus taat, 3 Badan Usaha berstatus tidak beroperasi** dan **48 Badan Usaha berstatus tidak taat**.

Sebanyak **77% Badan Usaha tidak taat** berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan BPPHLHK Wilayah Sulawesi diantaranya disebabkan karena kurangnya perhatian dari pihak pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga harus diterapkan upaya penegakan hukum salah satunya dengan **pemberian sanksi administrasi**. Pemberian sanksi administrasi agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha sehingga tidak merugikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Tingkat Ketaatan Badan Usaha Terhadap Peraturan Bidang LHK Tahun 2020-2023

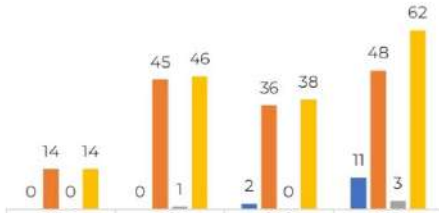

	2020	2021	2022	2023
Taat	0	0	2	11
Tidak Taat	14	45	36	48
Tidak Beroperasi	0	1	0	3
Total	14	46	38	62

Taat Tidak Taat Tidak Beroperasi Total

Kegiatan Pengawasan Ketaatan bidang LHK yang dilakukan BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2023

Kegiatan Verifikasi Pengaduan Terhadap PT. Bulawan Daya Lestari Di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara terkait aduan dugaan Kegiatan Penambangan Emas di dalam Kawasan Hutan Tanpa PPKH

Pengawasan ketaatan bidang LHK juga dilakukan atas dasar pengaduan yang masuk di BPPHLHK Wilayah Sulawesi atau disebut Pengawasan Insidental. Tahun 2023 terdapat **67 pengaduan yang masuk** yang terbagi atas 24 pengaduan bidang lingkungan hidup dan 43 pengaduan bidang kehutanan. Berdasarkan klasifikasi terlapor terbagi atas 30 pengaduan perusahaan dan 37 pengaduan non perusahaan.

No	Sumber/Media Pengaduan	Jumlah Pengaduan
1	Datang Langsung	19
2	Surat	20
3	Lain-Lain (WA dll)	14
4	Website	13
5	Media Sosial	1
	Jumlah	67

BPPHLHK Wilayah sulawesi telah mampu menangani pengaduan yang masuk yaitu sejumlah **37 pengaduan perusahaan** dan **31 pengaduan non perusahaan**. Pengaduan yang ditangani berasal dari sisa pengaduan tahun 2022 dan pengaduan baru tahun 2023.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021-2023

Selama periode kerja tahun 2021 hingga 2023, BPPHLHK Wilayah Sulawesi selalu mencapai target berdasarkan Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 capaian Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 90 menjadi 99 Badan Usaha.

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Target RENSTRA BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2020 – 2024 untuk IKK 5 adalah sebanyak **1.002 Perusahaan** yang diawasi ketaatanya. Total capaian IKK 5 dari tahun 2020 hingga 2023 adalah sebanyak **352 Perusahaan** atau **35,13 %**.

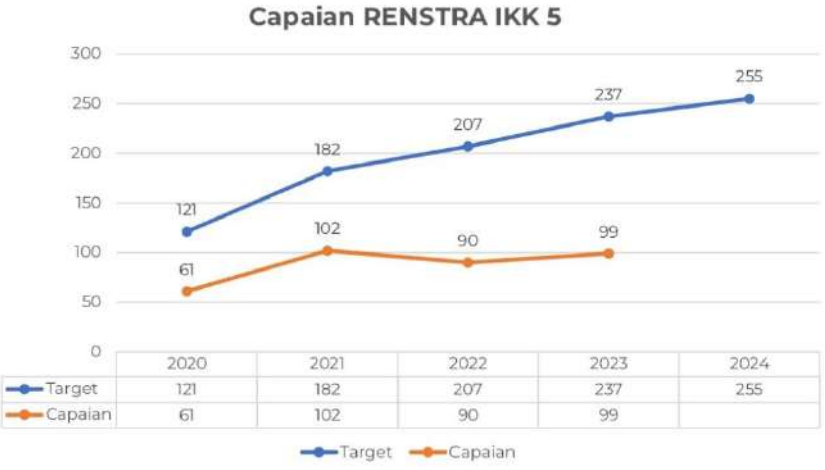

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	121	182	207	237	255
Capaian	61	102	90	99	

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Keberhasilan

Kinerja pada IKK 5 yaitu jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK pada tahun 2023 dapat mencapai target dikarenakan faktor sebagai berikut:

1. Pengaduan yang bersumber dari masyarakat dan/atau lembaga bantuan hukum atas dampat kerugian akibat adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Data badan usaha atau kegiatan yang memiliki perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Kinerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam melakukan verifikasi pengaduan dan pengawasan lingkungan hidup.

Hambatan

Dalam proses pencapaian target IKK 5 yaitu jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK terdapat beberapa kendala baik kendala subtantif maupun teknis yang dialami, yaitu antara lain:

1. Kewenangan pengawasan yang masih membedakan antara perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pengaduan dan jumlah daftar perusahaan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
2. Memprioritaskan pengaduan dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang paling berdampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 5

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Penanganan Pengaduan Perusahaan	803.457.000	803.423.785	100,00%
Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	636.287.000	636.103.835	99,97%
Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.710.256.000	1.709.293.297	99,94%
Total	**3.150.000.000**	**3.148.820.917**	**99,96%**

Prosentase Realiasi Anggaran	99,96%		
IKK (Input)		**1,10**	**Efisien**
Prosentase capaian IKK 5 (Output)	110 %	Efisiensi IKK 5	Kategori

6 IKK JUMLAH PPLH YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA

Target IKK 6	Realisasi IKK 6	Anggaran IKK 6	Realisasi Anggaran IKK 6
10 Orang	33 Orang	Rp 100.000.000	Rp 99.980.213
Prosentase Realisasi IKK 6		**Prosentase Realisasi Anggaran IKK 6**	
120%		99,98%	

BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 telah berhasil melaksanakan IKK 6 yaitu Pejabat Pegawas Lingkungan Hidup (PPL) yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK. Peningkatan kapasitas PPLH dimaksudkan agar PPLH memiliki pemahaman terkait peraturan bidang LHK dan ketrampilan yang baru sehingga menjadi pegangan dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi pengaduan kedepannya.

Target Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya berdasarkan Perjanjian Kerja Tahun 2023 adalah sebanyak **10 Orang**.

Realisasi pada tahun 2023, jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya adalah sebanyak **33 Orang** atau sebesar **120%**.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021-2023

Selama periode kerja tahun 2021 hingga 2023, BPPHLHK Wilayah Sulawesi selalu mencapai target berdasarkan Perjanjian Kinerja. Pada setiap tahunnya jumlah PPLH yang ditingkatkan mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 sejumlah 1 Orang, tahun 2022 sejumlah 6 Orang dan pada tahun 2023 naik menjadi sejumlah 33 Orang.

Capaian IKK jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya terpenuhi melalui kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar dan Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawasa Lingkungan Hidup. Berikut kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti BPPHLHK Wilayah Sulawesi:

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah PPLH yang Mengikuti	Penyelenggara
1.	Pelatihan Sistem Infomasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar	6-7 Mei 2023	30	BPPHLHK Wilayah Sulawesi
2.	Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	12-28 Juni 2023	3	BPPHLHK Wilayah Sulawesi & Dit. PPSALHK
3.	Pelatihan dan Sertifikasi Pengambilan Contoh Uji Air	Agustus 2023	2	Dit. PPSALHK
4.	Pelatihan dan Sertifikasi Sistem Informasi Geografis	Oktober 2023	2	Dit. PPSALHK

Kegiatan Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar dapat bermanfaat bagi PPLH dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan maupun verifikasi pengaduan. Di dalam kegiatan pengawasan maupun verifikasi pengaduan diperlukan keterampilan untuk bisa membaca dan membuat peta sebagai salah satu bukti untuk mendukung hasil pengawasan atau verifikasi pengaduan. Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan untuk memberikan bekal dan ilmu terkait pengawasan lingkungan hidup bagi Calon Pengawas Lingkungan Hidup.

Pelatihan Sistem Infomasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar

Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Keberhasilan

Kinerja pada IKK 6 yaitu jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2023 dapat mencapai target dikarenakan karena peran aktif Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam mengikuti pelatihan pengembangan profesi sehingga PLH lebih berkompeten dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi pengaduan.

Hambatan

Meskipun capaian target IKK 6 yaitu jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya dinilai telah memenuhi target, namun secara subtantif maupun teknis dalam pelaksanaan masih menghadapi kendala, sebagai contoh yaitu terbatasnya jenis pelatihan pengembangan profesi untuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu antara lain:

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melalui pelatihan dan bimbingan teknis baik yang diselenggarakan oleh instansi luar maupun yang pelatihannya diselenggarakan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi.
2. Tersedianya anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas lingkungan hidup.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 6

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	100.000.000	99.980.213	99,98%
Total	**100.000.000**	**99.980.213**	**99,98%**

Prosentase Realiasi Anggaran	99,98%		
IKK (Input)		**1,20**	**Efisien**
Prosentase capaian IKK 6 (Output)	120 %	Efisiensi IKK 6	Kategori

7 IKK JUMLAH KASUS PIDANA LHK YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN P21

Target IKK	Realisasi IKK	Anggaran IKK	Realisasi Anggaran IKK
30 Kasus	32 Kasus	8.026.423.000	8.013.050.861
Persentase Realisasi IKK **106,67%**		Persentase Realisasi Anggaran IKK **99,83%**	

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup an Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, BPPHLHK Wilayah Sulawesi mengemban tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan, sehingga jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21 menjadi bagian dari IKK tahun 2023. BPPHLHK Wilayah Sulawesi kemudian mampu mewujudkan hasil yang diharapkan melalui kegiatan berupa Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK, Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK, Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Perjanjian Kinerja, jumlah target kasus yang diselesaikan tahun 2023 sampai dengan P-21 adalah sebanyak 30 kasus LHK. Adapun capaian jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi adalah sebanyak 30 kasus LHK. Sehingga realisasi capian yang diperoleh adalah sebanyak 106,67 %.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 – 2023

Capaian perjanjian kinerja mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingan dengan tahun 2022, dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 28 kasus yang kemudian meningkat menjadi 32 kasus dengan selisih peningkatan sebanyak 4 kasus.

CAPAIAN RENCANA STATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Secara kumulatif, capaian target rencana strategis (renstra) dari tahun 2020 hingga 2024 terkait penyelesaian kasus tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan hingga mencapai tahap P-21 pada tahun 2023 adalah sebanyak 171 kasus. Berdasarkan capaian hingga Desember 2023, BPPHLHK Wilayah Sulawesi berhasil menyelesaikan 135 kasus atau mencapai 78,94% dari target tersebut.

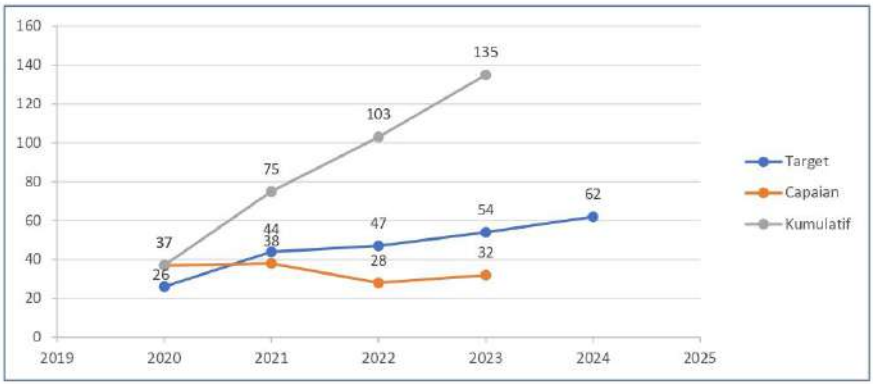

Tipologi Kasus LHK sampai dengan P21 Tahun 2023

Pada tahun 2023, BPPHLHK Wilayah Sulawesi berhasil menyelesaikan kasus LHK sebanyak 32 kasus yang tersebar di 6 provinsi pelayanan.. Dari hasil yang dicapai, terdapat 3 tipologi kasus yang berhasil diselesaikan yaitu Pembalakan liar sebanyak 16 kasus, Peredaran Tumbuhan & Satwa Liar sebanyak 6 kasus, serta Perambahan & perusakan hutan sebanyak 9 kasus.

Pembalakan Liar :
Sulawesi Selatan - 9 Kasus
Sulawesi Barat - 3 Kasus
Sulawesi Tengah - 4 Kasus

Tumbuhan & Satwa Liar :
Sulawesi Selatan - 3 Kasus
Gorontalo - 3 Kasus

Perambahan & Perusakan Hutan :
Sulawesi Selatan - 6 Kasus
Sulawesi Utara - 2 Kasus
Gorontalo - 2 Kasus

Proses penegakan hukum tidaklah mudah, pada praktiknya BPPHLHK Wilayah Sulawesi menghadapi adanya guguatan prapradilan dari tersangka. Selama tahun 2023 sendiri, telah dilakukan sidang praperadilan sebanyak 4 kasus dengan daftar sebagai berikut :

No.	Tipologi	Pemohon	Lokasi PN	Gugatan	Keterangan
1	Pembalakan Liar	Sdr. A	PN Kendari	1. Sah atau Tidaknya Penyidikan 2. Sah atau Tidaknya Penyitaan	Pengembalian Barang Sitaan
2	Pembalakan Liar	Sdr TA	PN Amurang	1. Sah atau Tidaknya Penyidikan 2. Sah atau Tidaknya Penyitaan 3. Ganti Rugi	Pengadilan Negeri Amurang tidak berwenang mengadili Perkara Praperadilan tersebut
3	Pembalakan Liar	Sdr. Ta	PN Manado	1. Sah atau Tidaknya Penyidikan 2. Sah atau Tidaknya Penyitaan 3. Ganti Rugi	Menerima Eksepsi Termohon
4	Pencemaran Lingkungan	Sdr. LK dan Sdr. AA	PN Kendari	1. Sah atau Tidaknya Penyidikan 2. Sah atau Tidaknya Penangkapan 3. Sah atau Tidaknya Penahanan 4. Sah atau tidaknya Penyitaan 5. Rehabilitasi	Penyidikan, Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan Sah

Memahami adanya tantangan dalam penegakan hukum, BPPHLHK Wilayah Sulawesi berupa untuk terus mendorong kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi mendukung upaya penegakan hukum yang akan dilakukan. Pada tahun 2023 BPPHLHK Wilayah Sulawesi melakukan 4 Perjanjian Kerjasama dengan data sebagai berikut :

NO	NO SURAT	URAIAN	PIHAK
1	PKS.2/BPPHLHK.3/TU/Gkm.2/5/2023 574/UN4.16/HK.07.00/2023	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum Kehutanan di Sulawesi	Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
2	W.25.UM.01.01-5763 PK.4/BPPHLHK.3/TU/7/2023	Kerjasama Penitipan Tahanan dan Barang Bukti	Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara
3	PKS.9/BPPHLHK.3/SW-I/SET.0/9/2023 W27.PAS.PAS11.HH.04.05-08 Tahun 2023	Kerja Sama Penyelenggaraan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari
4	W24.PAS.PAS.10.TI.04.02836 PKS.12/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/10/2023	Kerja Sama dalam bidang Pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran)	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Palu

Dalam ruang lingkup penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan, pada tahun 2023 BPPHLHK Wilayah Sulawesi telah melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus oleh aparat penegak hukum lainnya. Fasilitasi diberilkan dalam bentuk penyediaan ahli dalam tahap penyidikan atau persidangan dan dalam bentuk anggaran penyidikan.

Pengungkapan kasus hingga P.21 merupakan kerjasama antara anggota SPORC, PPNS, dan dukungan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 telah berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan dimulai dari operasi, pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), penanganan barang bukti, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, serta penyidikan. Kerja cepat dan profesional yang ditunjukkan penyidik mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga pelimpahan berkas ke Kejaksaan.

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung terlampauinya target IKK jumlah kasus LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 adalah sebagai berikut :

1. BPPHLHK Wilayah Sulawesi memiliki instrument Penegak Hukum yang kompeten. Di dalam strukturnya, Penyidik PNS tidak hanya dibiarkan bekerja sendiri, melainkan mereka mendapatkan dukungan yang efisien dari Unit Intelijen dan Unit Operasi. Kedua unit ini menunjukkan kinerja yang baik dalam membantu memperkuat penanganan kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Sulawesi.
2. Sarana prasarana dan dukungan anggaran yang memadai mendukung kelancaran penyidikan kasus serta memastikan bahwa proses ini berjalan dengan efektif.
3. Faktor Kepala Balai yang mampu berperan penting dengan memberikan arahan dan motivasi kepada PPNS di bawahnya. Selain itu pimpinan turut berperan aktif dalam upaya sinergi melalui koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait.
4. Proses penanganan kasus diimplementasikan dengan prinsip cepat, tangkap, tuntas, kontinyu, dan konsisten, sehingga mencerminkan pendekatan yang efisien dan terorganisir.
5. Keterlibatan aktif stakeholder terkait, seperti Dinas Kehutanan, KPH, Kepolisian, Kejaksaan, dan ahli, memiliki dampak signifikan dalam penyelesaian kasus tindak pidana LHK. Sinergi dan dukungan dari berbagai pihak membantu memastikan kelancaran proses penanganan kasus.

Hambatan

Meskipun jumlah target IKK jumlah kasus pidana LHK yang berhasil diselesaikan sampai dengan P-21 dapat melebihi target yang ditetapkan, namun masih ditemukan beberapa hambatan dalam segi teknis maupun substantif, Adapun hal tersebut berupa :

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA IKK 7

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (RP.)	Persentase
Pulbaket atas Dugaan Tindak Pidana LHK	1.049.239.000	1.049.099.977	99,99%
Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	3.759.531.000	3.750.930.795	99,77%
Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	184.454.000	180.653.966	97,94%
Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK	215.056.000	215.044.475	99,99%
Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana	2.818.143.000	2.817.321.648	99,97%
Total	**8.026.423.000**	**8.013.050.861**	**99,83%**

Persentase Realisasi Anggaran IKK **99,83%**

Prosentase Capaian IKK **106,67%**

1,06	EFISIEN
Efisiensi IKK	Kategori

GAKKUM KLHK MENJERAT DIREKTUR DAN KOMISARIS PT AG

Tersangka tersebut ialah LM (28) selaku Direktur PT AG dan AA (26) selaku Komisaris PT AG. Keduanya beralamat di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kedua Tersangka LM dan AA ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 2A Kendari.

Barang bukti sebanyak 17 unit alat berat Excavator PC 200 telah disita dan dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kendari.

Tersangka LM (28 th) beralamat di Dusun Salu Kasisi RT 001/ RW 001, Kelurahan Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan selaku Direktur PT AG.

Tersangka AA (26 th) beralamat di Dusun Salu Kasisi RT001/ RW 001 Kelurahan Malewong, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku Komisaris PT AG.

Penambang nikel ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara di Desa Oko-Oko, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dijerat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling banyak Rp10 Miliar.

8 IKK JUMLAH PPNS YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA

Target IKK	Realisasi IKK	Anggaran IKK	Realisasi Anggaran IKK
5 Orang	11 Orang	20,000,000	19,998,482
Persentase Realisasi IKK **120,00%**		Persentase Realisasi Anggaran IKK **99,99%**	

Proses penegakan hukum yang optimal memerlukan aparat penegak hukum yang kompeten, berdasarkan hal tersebut BPPHLHK Wilayah Sulawesi pada tahun 2023 telah berhasil melaksanakan IKK Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya melalui kegiatan dukungan teknis penegagakan hukum tindak pidana LHK dan peningkatan PPNS Bidang LHK.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam Perjanjian Kinerja, Jumlah PPNS Yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2023 adalah 5 orang. Adapun capaian jumlah PPNS yang ditingkatankan oleh BPPHLHK Wilayah Sulawesi adalah sebanyak 11 orang. Sehingga realisasi capian yang diperoleh adalah sebanyak 120,00%.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022-2023

Target perjanjian kinerja mengalami peningkatan pada tahun 2023 dibandingan dengan tahun 2022, dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 4 orang yang kemudian meningkat menjadi 5 orang yang masing-masing tiap tahunnya dapat diselesaikan diatas target yaitu 8 orang untuk tahun 2022 dan 5 orang untuk tahun 2023.

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Secara kumulatif, capaian target rencana strategis (renstra) dari tahun 2020 hingga 2024 terkait Jumlah PPNS Yang Ditingkatkan Kapasitasnya pada tahun 2023 adalah sebanyak **22 Orang**. Berdasarkan capaian hingga Desember 2023, BPPHLHK Wilayah Sulawesi berhasil meningkatkan kapasitas PPNS sebanyak **27 Orang** atau mencapai **120,00%** dari target tersebut.

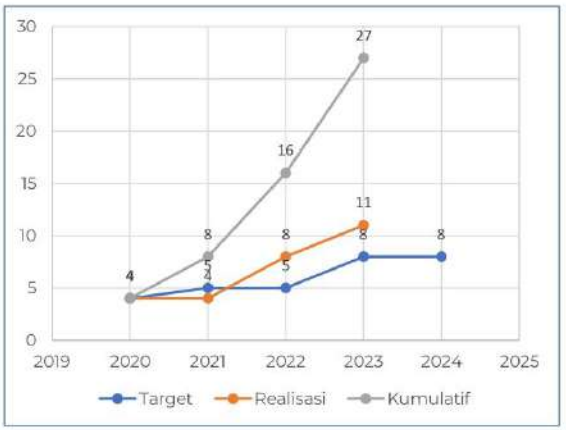

Peningkatan kapasitas PPNS bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kompetensi PPNS BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam menyelesaiakan penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin marak dan kompleks terjadi dengan berbagai modus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

Guna mengoptimalkan kinerja dan kapasitas Penyidik BPPHLHK Wilayah Sulawesi dalam menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan, pada tahun 2023 selain mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan juga didukung oleh dukungan teknis lainnya berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjangn kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Keberhasilan

Kinerja pada IKK Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2023 dapat mencapai target dikarenakan beberapa faktor yaitu :

1. Tersedianya personil Polisi Kehutanan dan PPLH yang kompoten dan siap untuk dilibatkan dalam pembentukan PPNS

1. Adanya peran aktif dan antusias penyidik dalam rangka pengembangan profesi
2. Adanya dukungan pimpinan terhadap peningkatan kinerja PPNS dan ketersediaan anggaran.

Hambatan

Meskipun capaian target Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 2023 dinilai telah memenuhi target, namun secara subtantif maupun teknis dalam pelaksanaan masih menghadapi beberapa kendala anatarlain:

1. Secara kualitas dan kuantitas SDM PPNS dilingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi masih belum optimal jika dibandingkan dengan banyaknya kasus lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi diwilayah Sulawesi.
2. Sarana dan prasana yang tersedia saat ini masih belum memadai dalam proses pengungkapan kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kapasitas PPNS.

Upaya Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis keberhasilan dan hambatan tersebut diatas, maka upaya tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024, yaitu mengupayakan untuk meningkatkan kapasitas PPNS melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berbasis teknologi didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai.

Peningkatan Kapasitas PPNS Tahun 2023

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah PPNS	Penyelenggara dan Lokasi
1.	Diklat Pembentukan PPNS LHK	6 Orang	Dit. PHP dan BPPHLHK Wilayah Sulawesi di Kab. Bogor
2.	Peningkatan PPS terkait TPPU	5 Orang	Dit. PHP dan BPPHLHK Wilayah Sulawesi di Bali
3.	Peningkatan PPNS terkait PSLH	2 Orang	BPPHLHK Wilayah Sumatera di Aceh
4.	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Terpadu Karhutla	3 Orang	Dit. PHP di Riau
5	Asistensi Penanganan Kasus TPPU LHK	27 Orang	Dit. PHP dan BPPHLHK Wilayah Sulawesi di Makassar

PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
GAKKUM

PENINGKATAN KAPASITAS
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 8

Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (RP.)	Persentase
PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20,000,000	19,998,482	**99,99%**
Total	20,000,000	19,998,482	**99,99%**

Persentase Realisasi Anggaran IKK **99,99%**

Prosentase Capaian IKK **120,00%**

1,20	**EFISIEN**
Efisiensi IKK	Kategori

9 IKK JUMLAH LAYANAN PERKANTORAN

Target IKK	Realisasi IKK	Anggaran IKK	Realisasi Anggaran IKK
1 layanan	1 Layanan	25,506,944,000	25,505,499,730
Persentase Realisasi IKK **100 %**		Persentase Realisasi Anggaran IKK **99,99%**	

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, Tahun 2023 telah berhasil melaksanakan IKK Layanan Perkantoran melalui kegiatan yaitu; Layanan terhadap Gaji dan Tunjangan, Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Target Jumlah Layanan Perkantoran berdasarkan Perjanjian kinerja adalah sebanyak 1 Layanan.

Jumlah Layanan Perkantoran pada Tahun 2023 sebanyak 1 Layanan, maka dengan kata lain dapat dikatakan pencapaian realisasi kinerja yang dimaksud adalah sebesar 100%.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022-2023

Capaian Kinerja Jumlah Layanan Perkantoran Tahun 2023, berdasarkan perjanjian kinerja sebanding dengan capaian tahun lalu (2022), yaitu sebanyak 1 Layanan di BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dibandingkan dengan Renstra 2020-2024 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, target Renstra Layanan Perkantoran tahun 2023 sebanyak 1 Layanan dan terealisasi sebanyak 1 Layanan atau sebesar 100% dari target Renstra 2020-2024.

ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Faktor Keberhasilan

Pencapaian target IKK terselenggaranya Layanan Perkantoran yang optimal selama Tahun 2023 (12 bulan) atau 1 Layanan terealisasi 100%. Beberapa kegiatan yang mendukung terlaksananya Layanan Perkantoran terdiri dari:

1. Terlaksananya Pembayaran gaji dan tunjangan, tunjangan kinerja dan uang makan pegawai lingkup Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi sebanyak 186 orang PNS dan PPNPN.
2. Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Kantor berupa :
   a. Terselenggaranya dan terpenuhinya kepeluan sehari-hari perkantoran;
   b. Terselenggaranya pembayaran honoraium terkait operasional perkantoran termasuk pembayaran 18 orang PPNPN;
   c. Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan, operasional kendaraan, pemeliharaan sarana perkantoran dan senjata api serta operasional lainnya yang menunjang pelaksaan tugas dan fungsi organisasi.
3. Keberhasilan dalam pencapaian IKK Layanan perkantoran pada tahun 2023 disebabkan dukungan, arahan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan terkait pengelolaan anggaran dan adanya dukungan SDM dalam menangani pengelola keuangan.

4. Kendala yang dihadapi yang dihadapi adanya revisi anggaran sehingga berpengaruh terhadap sistem tentatif pelaksanaan kegiatan.
5. Upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 9

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Gaji dan Tunjangan	21,478,025,000	21,476,995,454	100
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	4,028,919,000	4,028,504,276	99,99
Total	**25,506,944,000**	**25,505,499,730**	**99,99**

Prosentase Realiasi Anggaran	**99,99%**	**1,00**	**Efisien**
IKK 9 (Input)		Efisiensi IKK 9	Kategori
Prosentase capaian IKK 9 (Output)	**100%**		

10 IKK JUMLAH LAYANAN UMUM

Target IKK	Realisasi IKK	Anggaran IKK	Realisasi Anggaran IKK
1 layanan	1 Layanan	1,764,190,000	1,762,848,446
Persentase Realisasi IKK **100 %**		Persentase Realisasi Anggaran IKK **99,92%**	

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, Tahun 2023 telah berhasil melaksanakan IKK Layanan Umu. Pencapaian Output Jumlah Layanan Umum didukung oleh beberapa komponen kegiatan yaitu:

1. **Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran**

   Capaian kegiatan komponen penyusunan program dan anggaran dalam tahun 2023 didukung oleh kegiatan sub komponen yaitu Penyusunan Pagu 2023, Penyusunan Pagu Indikatif 2023, Program dan anggaran ke wilayah kerja dan Penyusunan Rencana Kerja 2023.

2. **Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.**

   Capaian kegiatan komponen pemantauan dan evaluasi dalam tahun 2023 didukung oleh kegiatan sub komponen yaitu Kunjungan Pimpinan Balai dalam rangka kinerja ke wilayah kerja dan Pengurusan dan pengelolaan administrasi BMN.

3. **Pengelolaan Keuangan**

   Capaian kegiatan komponen pengelolaan keuangan dalam tahun 2023 didukung oleh kegiatan sub komponen antara lain penyusunan laporan keuangan, Pembinaan keuangan ke wilayah kerja dan pelaksanaan SPIP.

4. **Pengelolaan Kepegawaian**

   Capaian kegiatan komponen pengelolaan kepegawaian dalam tahun 2023 didukung oleh kegiatan sub komponen pelaksanaan uji kompetensi, pembinaan kepegawaian ke wilayah kerja, pengarusutamaan gender, dan penyelenggaraan Zona Integritas WBK dan WBBM.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Target Jumlah Layanan Umum berdasarkan Perjanjian kinerja adalah sebanyak 1 Layanan.

Jumlah Layanan Umum pada Tahun 2023 sebanyak 1 Layanan, maka dengan kata lain dapat dikatakan pencapaian realisasi kinerja yang dimaksud adalah sebesar 100%.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022-2023

Capaian Kinerja Jumlah Layanan Umum Tahun 2023, berdasarkan perjanjian kinerja sebanding dengan capaian tahun lalu (2022), yaitu sebanyak 1 Layanan di BPPHLHK Wilayah Sulawesi.

CAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dibandingkan dengan Renstra 2020-2024 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi, target Renstra Jumlah Layanan Umum Per tahun 2023 sebanyak 1 Layanan dan terealisasi sebanyak 1 Layanan atau sebesar 100% dari target Renstra 2020-2024.

Beberapa keluaran (Output) yang dihasikan terhadap capaian IKK yaitu berupa dokumen program dan anggaran serta laporan monitoring dan evaluasi kinerja dan keuangan diantaranya yaitu Laporan Keuangan dan BMN 2023, Dokumen SPIP Tahun 2023, Laporan Perdataan, Laporan Kepegawaian, Rencana Kerja 2023, RKA-KL 2023, ROK 2023, serta dokumen terkait lainnya.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 10

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	249,363,000	249,335,469	99,99
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	254,093,000	254,091,047	100
Pengelolaan Keuangan	234,945,000	234,644,700	99,87
Pengelolaan Kepegawaian	218,347,000	218,310,014	99,98
Total	1,764,190,000	1,762,848,446	**99,92**

Prosentase Realiasi Anggaran	99,92 %	**1,00**	**Efisien**
IKK 10 (Input)		Efisiensi IKK 10	Kategori
Prosentase capaian IKK 10 (Output)	100 %		

11 IKK JUMLAH SARANA INTERNAL

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban, pada tahun 2023 telah berhasil melaksanakan IKK Jumlah Sarana Internal. IKK Jumlah Sarana Internal merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka mendukung ketersediaan sarana dan prasarana kantor. Pencapaian Output Jumlah Sarana Internal didukung oleh beberapa komponen yaitu Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan di lingkup BPPHLHK Wilayah Sulawesi Tahun 2023.

Target IKK	Realisasi IKK	Anggaran IKK	Realisasi Anggaran IKK
1 Unit	1 Unit	2,454,389,000	2,453,031,931
Persentase Realisasi IKK **100 %**		Persentase Realisasi Anggaran IKK **99,94%**	

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Target Jumlah Saranan Internal berdasarkan Perjanjian kinerja adalah sebanyak 1 Unit. Jumlah Sarana Internal pada Tahun 2023 berupa Pembangunan Kantor Pos Gakkum LHK Gorontalo sebanyak 1 Unit, maka dengan kata lain dapat dikatakan pencapaian realisasi kinerja yang dimaksud adalah sebesar 100%.

Beberapa keluaran (Output) yang dihasilkan terhadap capaian IKK Jumah Sarana Internal tahun 2023 yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, sesuai dengan perkembangan teknologi serta dapat meningkatkan efisiensi operasional organisasi dan meningkatkan standar kualitas lingkungan kerja berupa:

1. Pembangunan/Renovasi gedung bangunan di kantor Balai, Seksi Wilayah dan Pos Gakkum LHK berupa pemeliharaan kantor Balai dan Seksi Wilayah.
2. Pengadaan peralatan dan mesin untuk kantor Balai, Seksi Wilayah dan Pos Gakkum yaitu drone, laptop, teleconfrence meeting, TV monitor pemeriksaan, CCTV, Printer, HP untuk operator drone, HP untuk operator/aprrover Srikandi, komputer PC, HP untuk operator Pengaduan dan scanner.
3. Pengadaan Kendaraan Bermotor penunjang tugas dan fungsi berupa Pengadaan Mobil fungsional/intelijen sebanyak 3 unit.
4. Pengadaan peralatan dan mesin-eksrakomptabel untuk kantor Balai, Seksi Wilayah dan Pos Gakkum LHK yaitu lemari arsip, sofa ruang tamu, kursi kerja staf, meja kerja staf, kursi rapat, meja rapat, Air Conditioner dan lemari senjata.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA IKK 11

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	430,487,000	430,380,155	99,98
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1,022,977,000	1,022,488,186	99,95
Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1,000,925,000	1,000,163,590	99,92
Total	**2,454,389,000**	**2,453,031,931**	**99,94**

Prosentase Realiasi Anggaran	99,94 %		
IKK 11 (Input)		**1,00**	**Efisien**
Prosentase capaian IKK 11 (Output)	100 %	Efisiensi IKK 11	Kategori

REALISASI ANGGARAN

Dalam upaya melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Wilayah Sulawesi, pada tahun 2023, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi melaksanakan kegiatan dengan didukung anggaran sebagaimana dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPHHLHK Wilayah Sulawesi tahun 2023. Anggaran pada DIPA BPPHLHK Wilayah Sulawesi tahun 2023 tercatat sebesar 48.250.209.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Berdasarkan pagu DIPA Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi tersebut, penyerapan anggaran sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 sebesar 48,224,665,624,- (Empat Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 99,95% (Sumber: OM-SPAN BPPHLHK Wilayah Sulawesi T.A. 2023).

Rincian pagu dan realisasi anggaran BPPHLHK Wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	3,363,200,000	3,362,462,184	99,98
Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan & Satwa Liar	2, 665,063,000	2,664,162,526	99,97
Peningkatan Kapasitas Polhut	500.000.000	499.959.844	99,99
Jumlah Perkara Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan	700.000.000	694.840.490	99,26
Jumlah Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lhk	3.150.000.000,00	3.148.820.917,00	99,96
PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	100.000.000	99.980.213	99,98
Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	8,026,423,000	8,013,050,861	99,83

Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya	20,000,000	19,998,482	99,99
Jumlah Layanan Perkantoran	25,506,944,000	25,505,499,730	99,99
Jumlah Layanan Umum	1,764,190,000	1,762,848,446	99,92
Jumlah Sarana Internal	2,454,389,000	2,453,031,931	99,94
TOTAL	**48.250.209.000**	**48,224,655,624**	**99,95**

Menurut jenis anggaran, alokasi belanja barang merupakan alokasi tertinggi berdasarkan jenis belanja yaitu sebesar 47% dilanjutkan belanja pegawai sebesar 46% dan belanja modal 8%. Penyerapan anggaran tertinggi berada pada jenis belanja modal sebesar 99,98% menyusul belanja pegawai 99,92% dan belanja barang 99,90%.

BAB III

RENCANA KERJA 2024

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM LHK DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

FIGHT AGAINST X-CRIME

SASARAN EKONOMI MAKRO RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

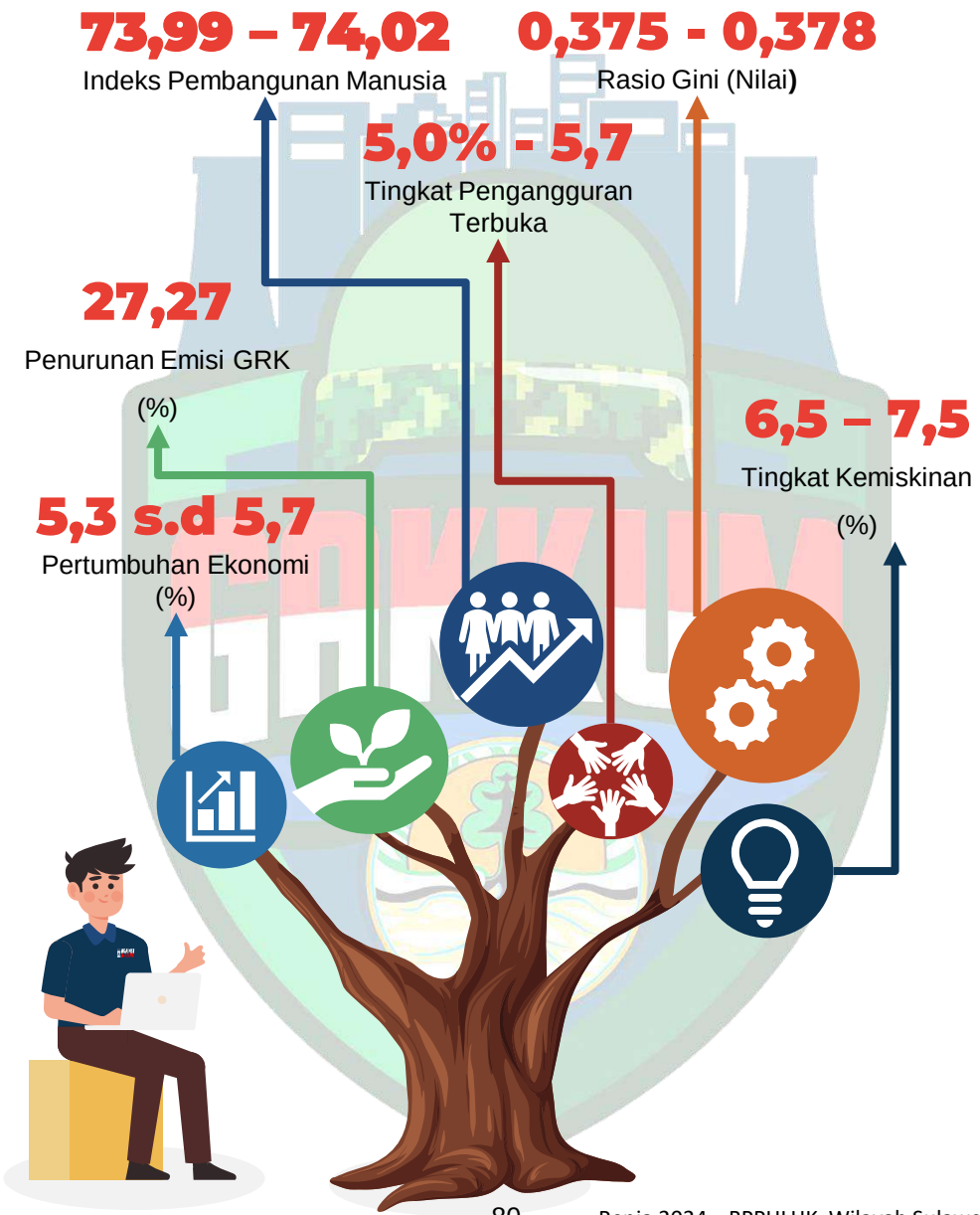

Arah Kebijakan Strategi Nasional

MISI PRESIDEN	ARAHAN PRESIDEN	7 AGENDA PRESIDEN
1 | PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA	1 | PEMBANGUNAN SDM	MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN
2 | STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING	2 | PEMBANGUNAN INFRAKSTRUKTUR	MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN
3 | PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN	3 | PENYEDERHANAAN REGULASI	MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
4 | MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN	4 | PENYEDERHANAAN BIROKRASI	REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN
5 | KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA	5 | TRANSFORMASI EKONOMI	MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR
6 | PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT,DAN TERPERCAYA		MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM
7 | PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA		MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK
8 | PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN TERPERCAYA		
9 | SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN		

TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

(1) PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

- Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial ekonomi (Resosek untuk Peningkatan Akurasi Program Perlindungan Sosial).
- Konvergensi pelaksanaan Program-Program perlindungan social.
- Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan.
- Peningkatan Kesejahteraan petani dan nelayan.
- Peningkatan kualitas konsumsi pangan.

(2) PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN TRANSISI ENERGI

- Melaksanakan Pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir).
- Konservasi lahan produktif.
- Menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan.
- Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.

(3) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

- Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan.
- Reformasi sistem perlindungan social.
- Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta.
- Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas.
- Meningkatkan kualitas anak, Perempuan dan pemuda.
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

(4) PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS

- Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh.
- Meningkatkan ketahanan air ditingkat wilayan Sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air dan Hemat Air.
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda Pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan disetiap wilayah.
- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi.
- Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan (3TP).

(5) REVITALISASI INDUSTRI DAN PENGUATAN RISET TERAPAN

- Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industry yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok.
- Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.

(6) PERCEPATAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

- Membangun Gedung pemerintahan dan hunian;
- Membangun infrastruktur utama.

(7) PENGUATAN DAYA SAING USAHA

- Meningkatkan kualitas teknologi informasi.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi.
- Mewujudkan investasi yang ramah dan kondusif.
- Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi.
- Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

(8) PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan.
- Mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
- Mendukung penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri.

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, RKP 2023;

PRIORITAS NASIONAL RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tqluh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketu.iuh Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 disampaikan dalam infogralis di bawah ini.

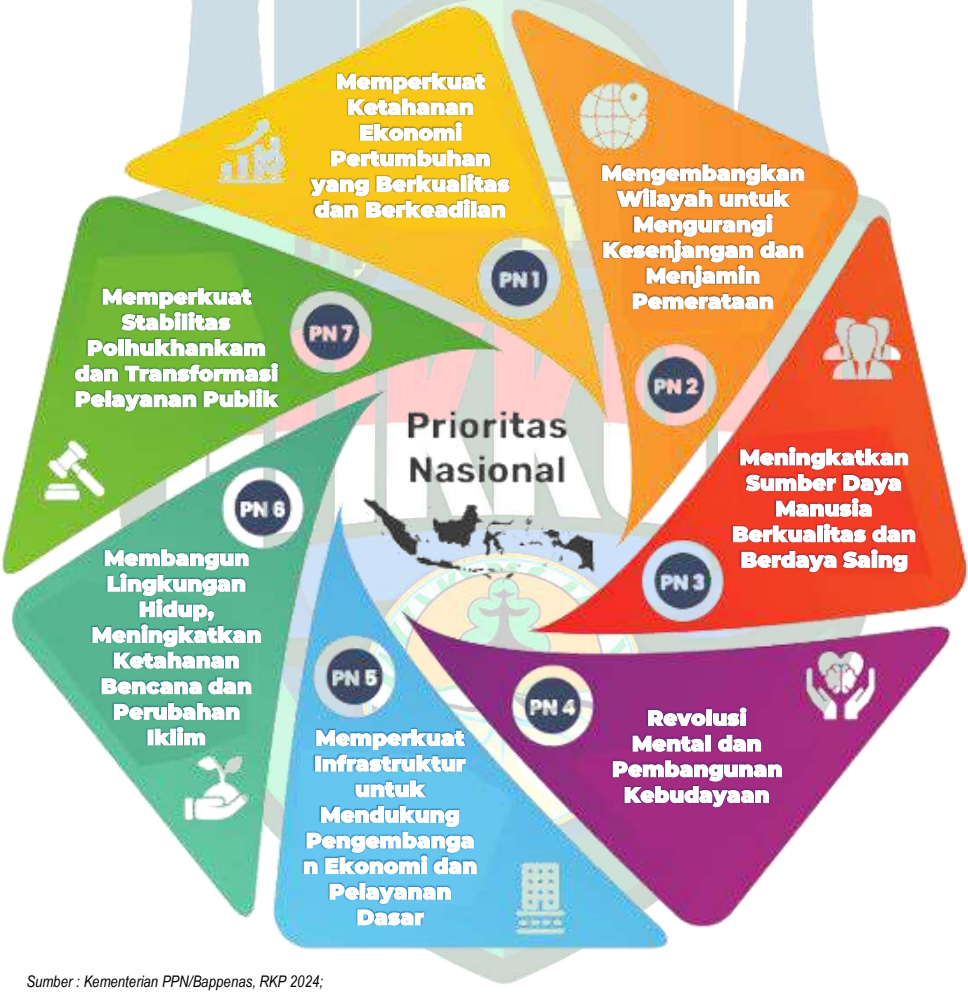

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, RKP 2024;

TEMA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Tema Pembangunan LHK

"Geliat Pengelolaan Hutan dan Lingkungan Hidup di Seluruh Provinsi Seiring Pertumbuhan Ekonomi yang Semakin Merata".

INTERNALISASI PRIORITAS NASIONAL KEDALAM PEMBANGUNAN LHK TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bertema **" Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan "** dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) , dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) mendukung pada 4 (empat) PN yaitu : (PN-1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN-2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN-3) meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan (PN-6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Selanjutnya, 4 (empat) PN tersebut diinternalisasi ke dalam pembangunan LHK sebagai berikut.

1 MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

- Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung factor pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industry pengolahan dan destinasi wisata

3 MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

- Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan tanah obyek reforma agrarian, perhutanan social, peningkatan kapasitas Masyarakat dan Pendidikan vokasi

2 MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

- Membantu Menyiapkan Ibu Kota Nusantara

6 MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 bertema **"**Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan **",** pada Prioritas Nasional 6 (PN-6) **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim,** diinternalisasi ke dalam kebijakan Ditjen Gakkum KLHK sebagai berikut.

Rencana Strategi KLHK TA 2020 s.d 2024

Isu Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BROWN ISSUES

- Pengelolaan Sampah – Limbah dan B3;
- AMDAL – UKL – UPL, dan Izin Lingkungan;
- Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan;

GREEN ISSUES

- Penataan kawasan usaha kehutanan
- Perbenihan tanaman Hutan dan pemulihan poho

Siti Nurbaya
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

IDENTIFIKASI & PERTAUTAN ISU

- PENEGAKAN HUKUM
- KONSERVASI BIODIVERSITAS
- PENGELOLAAN DAS
- EKONOMI LINGKUNGAN
- PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- PERUBAHAN IKLIM

Hints Program

1. LOKASI SUMBERDAYA HUTAN UNTUK PEMERATAAN EKONOMI
2. PENGENDALIAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN/LAHAN
3. KONSERVASI DAN PEMELIHARAAN BIODIVERSITY DAN BIOSFER
4. PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN
5. PENGENDALIAN KEJAHATAN LINGKUNGAN
6. KEMITRAAN DAN KETERLIBATAN STAKEHOLDERS DALAM RANTAI USAHA HUTAN DAN SAMPAH

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL 6 (ENAM) : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran Prioritas Nasional 6 (Enam) :

- Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan Perbaikan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim dengan perbaikan pada penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklik terhadap PDB.
- Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan perbaikan pada (a) Persentase penurunan Emisi GRK-Kumulatif, (b) Persentase penurunan GRK-Tahunan, dan (c) Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK.

Dukungan Ditjen Gakkum KLHK Mendukung Prioritas Nasional 6 (Enam) dengan Total Anggaran Rp. 150,309 M

Tagging Mitigasi Perubahan Iklim Rp 192,732 M	Tagging Anggaran Responsif Gender Rp 2,000 Milliar

Peningkatan kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan	Penanggulangan Pengangguran Disertai Dengan Peningkatan Decent Job	Mendorong Pemulihan Dunia Usaha	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)	Pengembangan Ibu Kota Nusantara
Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum LHK	Pelaksanaan Penegakan Hukum LHK untuk memastikan masyarakat sekitar hutan tidak kehilangan haknya	Prinsip *Restorative Justice* dengan Penerapan Sanksi Administratif pada perusahaan sebagai pelaksanaan mandat UUCK	Penegakan Hukum LHK sebagai bentuk kontribusi pada FOLU Net Sink 2030	Penguatan Penegakan Hukum LHK di sekitar kawasan IKN dengan pelaksanaan operasi, pengawasan dan penindakan

PRIORITAS NASIONAL 6 (ENAM) : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Program Prioritas 3 : Pembangunan Rendah Karbon

Program Prioritas 2 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Kegiatan Prioritas 1: Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas 2: Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas 3: Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas 4: Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pro-PN:

1) Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah
2) **Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**
3) **Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Program Prioritas1 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Bidang	Anggaran Rp. Juta
Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01. Persentase Pemegang Izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	70%	PHLHK	312.764
		02. Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan kehutanan yang ditangani	640 Kasus	PHLHK	
		03. Jumlah Luas Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	2.100.000 Hektar	PHLHK	
		04. Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup	8 Daerah	NON PHLHK	

Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Bidang	Anggaran Rp. Juta
Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Terlaksananya Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01. Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan peraturan bidang LHK	1.450 Badan Usaha	PHLHK	167.292,1
		02. Jumlah Sistem Kajian Dampak Lingkungan dan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup	1 Sistem	NON PHLHK	
		03. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	430 Operasi	PHLHK	
		04. Jumlah Layanan Permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan	240 Layanan	NON PHLHK	

Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	Bidang	Anggaran Rp. Juta
Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan mediasi dalam proses penegakan hukum bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	01-Terlaksananya Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata dan Mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	01. Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap	350 Perkara	PHLHK	94,233,8
		02. Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan	110 Perkara	PHLHK	

Strategi Program:

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PILAR LINGKUNGAN : KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG SEMAKIN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

SASARAN STRATEGIS 1 (T1. S1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T1.S1)
MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

1. PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN PROGRAM 1 (T1.S1.1.9)	INDIKATOR PROGRAM 1 (T1.S1.1.9)
MENINGKATNYA BUDAYA KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG LHK	PERSENTASE PEMEGANG IZIN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN TERKAIT BIDANG LHK
SASARAN PROGRAM 2 (T1.S1.10)	INDIKATOR PROGRAM 2 (T1.S1.1.9)
TERSELESAIKANNYA KASUS PENEGAKAN HUKUM BIDANG LHK	JUMLAH KASUS PIDANA DAN PERDATA YANG DITANGANI

SASARAN STRATEGIS 4 (T1. S4)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 (IKU T1.S4)
MENURUNNYA LAJU PENYUSUTAN HUTAN	LAJU DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

3. PROGRAM HUTAN BERKELANJUTAN

SASARAN PROGRAM 3 (T1.S4.1.4)	INDIKATOR PROGRAM 3 (T1.S4.1.4
MENINGKATNYA PENGAMANAN HUTAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN	LUAS HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN

PILAR TATA KELOLA : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, RESPONSIF DAN BERPELAYANAN PRIMA

SASARAN STRATEGIS 13 (T4. S2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 13 (T4. S2)
MENINGKATNYA BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG *AGILE*, EFEKTIF DAN EFISIEN	NILAI KINERJA REFORMASI BIROKRASI

5. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SASARAN PROGRAM 4 (T4.S2.1.4)	INDIKATOR PROGRAM 4 (T4.S2.1.4)
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KLHK	NILAI SAKIP

Indikator Kinerja Unit Kegiatan Eselon I (UKE I)

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.

1.200.000 HA
Hutan Diamankan dari Gangguan dan Ancaman

225
Kasus Pidana dan Perdata yang Ditangani

53 %
Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK

80 POIN
Nilai SAKIP Ditjen Penegakan Hukum LHK

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	TARGET RENJA	ANGGARAN RENSTRA	ANGGARAN RENJA
1. PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
PERSENTASE PEMEGANG IZIN YANG TAAT TERHADAP PERATURAN TERKAIT BIDANG LHK	70 Persen	53 Persen	44.559.861	32.750.000
JUMLAH KASUS PIDANA DAN PERDATA YANG DITANGANI	500 Kasus	225 Kasus	77.609.719	92.154.694
3. PROGRAM HUTAN BERKELANJUTAN				
LUAS HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN	1.200.000 Hektar	1.200.000 Hektar	57.771.220	78.227.339
5. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	80 Poin	80 Poin	242.998.698	301.339.685

Cascading Kinerja 2024

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN STRATEGIS 1 (T1.S1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T1.S1)	TARGET
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**69,74 Poin**
SASARAN UKE I 1 (T1.S1.1.9)	**INDIKATOR UKE I 1 (T1.S1.1.9)**	**TARGET UKE I 1**
Meningkatnya budaya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	53 %

KEGIATAN 5430

Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif

SASARAN KEGIATAN (T1.S1.1.9.1.1)

Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK

INDIKATOR KEGIATAN

T1.S1.1.9.1.1.1
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketataannya terhadap peraturan perundag-undangan bidang LHK

RO

001-Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK

KRO

QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha

KOMPONEN

- 01.QIH.001.051 Penanganan Pengaduan Perusahaan (Badan Usaha)
- 01.QIH.001.052 Penanganan Pengaduan Non Perusahaan (Pengaduan)
- 01.QIH.001.053 Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Badan Usaha)
- 01.QIH.001.052 Sanksi Administrasi (Sanksi)

T1.S1.1.9.1.1.2
Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya

001-PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya

DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup

- '01.DCE.001.051 Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK
- '01.DCE.001.052 Pembentukan PPLH

SASARAN STRATEGIS 1 (T1.S1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T1.S1)	TARGET
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**69,74 Poin**

SASARAN UKE I 2 (T1.S1.1.10)	INDIKATOR UKE I 2 (T1.S1.1.10)	TARGET UKE I 2
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata yang ditangani	225 Kasus

KEGIATAN 5429

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

SASARAN KEGIATAN (T1.S1.1.10.1.2)

Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan

INDIKATOR KEGIATAN

T1.S1.1.10.1.2.1 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan

RO

001- Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani

KRO

QCE-Penanganan Perkara

KOMPONEN

- 01.QCE.001.051 Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH (dokumen)
- 01.QCE.001.052 Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat (Dokumen)
- 01.QCE.001.053 Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan (Perkara)
- 01.QCE.001.054 Penyusunan dan Pendaftaran Gugatan (Perkara)
- 01.QCE.001.055 Pelaksanaan Persidangan (dokumen)
- 01.QCE.001.056 Upaya Hukum (Perkara)
- 01.QCE.001.057 Fasilitasi Pelaksanaan Eksekusi (Dokumen)
- 01.QCE.001.058 Dukungan Teknis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Layanan)

SASARAN STRATEGIS 1 (T1.S1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T1.S1)	TARGET
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**69,74 Poin**

SASARAN UKE I 2 (T1.S1.1.10)	INDIKATOR UKE I 2 (T1.S1.1.10)	TARGET UKE I 2
Terselesaikannya kasus penegakan hukum bidang LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata yang ditangani	225 Kasus

KEGIATAN 5431

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN KEGIATAN (T1.S1.1.10.1.1)

Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21

INDIKATOR KEGIATAN

T1.S1.1.10.1.1.1
Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap

RO

001-Kasus Tindak Pidana LHK P21

KRO

QCE-Penanganan Perkara

KOMPONEN

- 01.QCE.001.051 Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK (Dokumen)
- 01.QCE.001.052 Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK (Perkara)
- 01.QCE.001.053 Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK (Laporan)
- 01.QCE.001.054 Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (Kegiatan)

T1.S1.1.10.1.1.3
Jumlah Berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan

002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan

QCE-Penanganan Perkara

- 01.QCE.002.051 Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK (Dokumen)
- 01.QCE.002.052 Penyusunan penetapan denda administratif (Perkara)
- 01.QCE.001.053 Verifikasi lapangan atas ketaatan terhadap penerapan denda administratif (Dokumen)

T1.S1.1.10.1.1.2
Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya

001-PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya

DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup

- 01.DCE.001.051 Peningkatan PPNS LHK
- 01.DCE.001.052 Pembentukan PPNS LHK

SASARAN STRATEGIS 1 (T1.S4)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 (IKU T4.S1)	TARGET
Menurunnya laju penyusutan hutan	**Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan**	**0,2 Juta Hektar**
SASARAN UKE I 1 (T1.S1.1.9)	**INDIKATOR UKE I 1 (T1.S1.1.9)**	**TARGET UKE I 1**
Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	Luas hutan yang diamankan dari ancaman dan gangguan hutan, serta perusakan lingkungan	1.200.000 Hektar

KEGIATAN 5428

Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN KEGIATAN (T1.S4.1.4.1.1)

Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan

INDIKATOR KEGIATAN	RO	KRO	KOMPONEN
T1.S4.1.4.1.1.1 Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	(QHB) Operasi Bidang Keamanan	01.QHB.001.051 Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan (Dokumen)
			01.QHB.001.052 Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan (Operasi)
			01.QHB.001.053 Operasi Penyelamatan SDA (Operasi)
T1.S4.1.4.1.1.3 Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	(QHB) Operasi Bidang Keamanan	01.QHB.002.051 Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal (Dokumen)
			01.QHB.002.052 Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan (Kegiatan)
			01.QHB.002.053 Operasi Pembalakan Liar (Operasi)
			01.QHB.002.054 Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar (Operasi)
T1.S4.1.4.1.1.2 Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	
			'01.DCE.001.051 Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan LHK

SASARAN STRATEGIS 13 (T4.S2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA 13 (IKU T4.S2.1)	TARGET
Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	**Nilai kinerja reformasi birokrasi**	**85 Poin**

SASARAN UKE I 4 (T4.S2.1.1)	INDIKATOR UKE I 4 (T4.S2.1.1.1)	TARGET UKE I 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80 Poin

KEGIATAN 5427

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

SASARAN KEGIATAN (T4.S2.1.1.1.9)	RO	KRO	KOMPONEN
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	962-Layanan Umum	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	01.EBA.962.051 Layanan PEHKT 01.EBA.962.052 Layanan KKOTL 01.EBA.962.053 Layanan Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit 01.EBA.962.054 Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja
	994-Layanan Perkantoran		01.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan 01.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor
	951-Layanan Sarana Internal	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	051- Pengadaan Kendaraan Bermotor (Unit) 052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Paket) 053 - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (Paket) 054 - Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan (paket)

INDIKATOR KEGIATAN	TARGET
T4.S2.1.1.1.9.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80 Poin
T4.S2.1.1.1.9.3 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tertib dan akuntabel	1 Laporan
T4.S2.1.1.1.9.2 Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4 Level

RENCANA KERJA TAHUN 2024

PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

KEGIATAN	KRO	RO	VOL	PAGU	TAGGING
Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	20 Operasi	6.417.940.000	Mitigasi Perubahan Iklim
	QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	17 Operasi	5.611.380.000	Mitigasi Perubahan Iklim
	DCE-Pelatihan Bidang LHK	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan Kapasitasnya	15 Orang	200.000.000	Mitigasi Perubahan Iklim

PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN	KRO	RO	VOL	PAGU	TAGGING
Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	QIH – Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan Usaha yang diawasi ketaatannya terhadap PUU bidang LHK	111 Badan Usaha	2.876.350.000	Mitigasi Perubahan Iklim
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	QCE – Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	2 Perkara di Luar Pengadilan	580.000.000	Mitigasi Perubahan Iklim
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	QCE – Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	30 Perkara	7.871.380.000	Mitigasi Perubahan Iklim

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

KEGIATAN	KRO	RO	VOL	PAGU	TAGGING
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum LHK	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1 Layanan	2.000.000.000	Bukan Tematik
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	28.089.944.000	Bukan Tematik
	Layanan Sarana Internal	Layanan Sarana Internal	1 Unit	6.372.400.000	Bukan Tematik

ALOKASI ANGGARAN
BPPHLHK WILAYAH SULAWESI TAHUN 2024

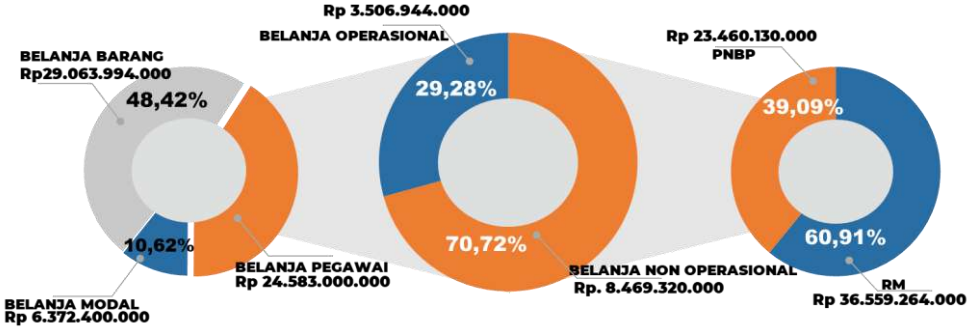

PAGU ANGGARAN BPPHLHK WILAYAH SULAWESI

60.019.394.000

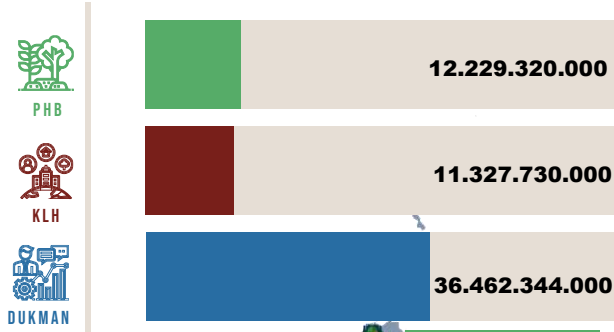

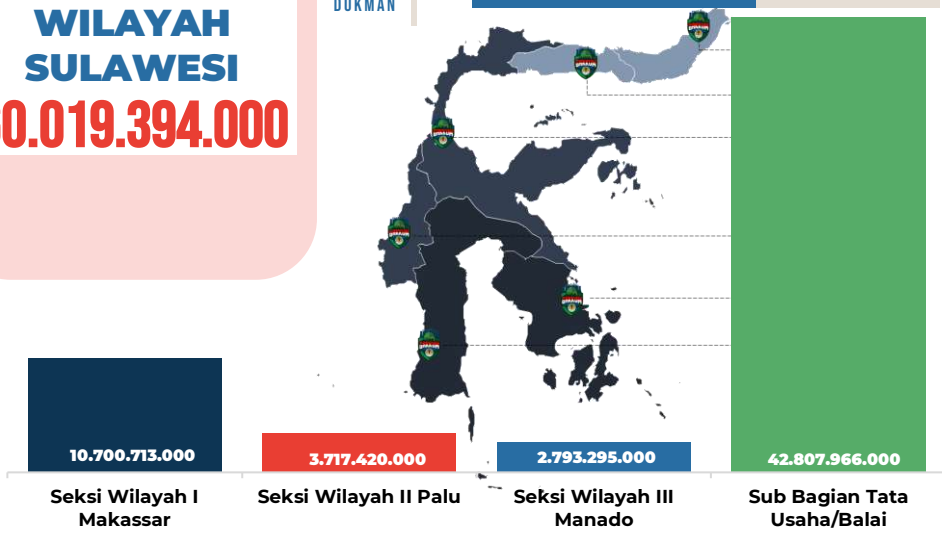

ALOKASI ANGGARAN PER WILAYAH

BPPHLHK Wilayah Sulawesi

KEGIATAN/ KRO/ RO			PAGU TAHUN 2024				
			TOTAL PAGU 2024	TU	SWI	SWII	SWIII
5427.EBB.951		**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	**6.372.400.000**	**5.446.150.000**	**-**	**926.250.000**	**-**
	051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	1.253.261.000	1.253.261.000	-	-	-
	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1.213.609.000	1.213.609.000	-	-	-
	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	2.361.780.000	2.361.780.000	-	-	-
	054	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1.543.750.000	617.500.000	-	926.250.000	-
5427.EBA.962		**Layanan Umum**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**-**	**-**	**-**
	054	Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-
5427.EBA.994		**Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)**	**28.089.944.000**	**28.089.944.000**	**-**	**-**	**-**
	001	Gaji dan Tunjangan	24.583.000.000	24.583.000.000	-	-	-
	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.506.944.000	3.506.944.000	-	-	-
5428.DCE.001		**Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan**	**200.000.000**	**200.000.000**	**-**	**-**	**-**
	051	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200.000.000	200.000.000	-	-	-
5428.QHD.001		**Operasi Pengamanan Kawasan Hutan**	**6.417.940.000**	**1.572.640.000**	**3.530.000.000**	**657.650.000**	**657.650.000**
	051	Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	2.165.940.000	705.940.000	1.148.000.000	156.000.000	156.000.000
	052	Operasi Pemulihan Pengamanan Kawasan Hutan	4.252.000.000	866.700.000	2.382.000.000	501.650.000	501.650.000
	053	Operasi Penyelamatan SDA	-	-	-	-	-
5428.QHD.002		**Operasi Peredaran Hasil Hutan**	**5.611.380.000**	**1.896.242.000**	**2.700.853.000**	**506.080.000**	**508.205.000**
	051	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	1.656.520.000	471.932.000	985.588.000	99.500.000	99.500.000
	053	Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	650.000.000	650.000.000	-	-	-
	054	Operasi Pembalakan Liar	1.575.075.000	276.600.000	816.175.000	241.150.000	241.150.000
	055	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	1.129.785.000	139.785.000	763.600.000	113.200.000	113.200.000
	056	Penguatan Sistem Intelejen	-	-	-	-	-
	057	Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	600.000.000	357.925.000	135.490.000	52.230.000	54.355.000
5429.QCE.001		**Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup**	**580.000.000**	**580.000.000**	**-**	**-**	**-**
	051	Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH	240.000.000	240.000.000	-		-
	052	Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat	60.000.000	60.000.000	-	-	-
	053	Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	280.000.000	280.000.000	-	-	-
5430.DCE.001		**Peningkatan Kapasitas PPLH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	051	Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	-	-	-	-	-
5430.QIH.001		**Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha**	**2.876.350.000**	**1.117.250.000**	**960.700.000**	**399.200.000**	**399.200.000**
	051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	1.124.800.000	388.700.000	336.900.000	199.600.000	199.600.000
	052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	816.000.000	341.900.000	274.500.000	99.800.000	99.800.000
	053	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	935.550.000	386.650.000	349.300.000	99.800.000	99.800.000
5431.DCE.001		**Peningkatan Kapasitas PPNS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	051	Peningkatan Kapasitas PPNS Bidang LHK	-	-	-	-	-
5431.QCE.001		**Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK**	**7.871.380.000**	**1.905.740.000**	**3.509.160.000**	**1.228.240.000**	**1.228.240.000**
	051	Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	3.052.920.000	286.420.000	1.890.500.000	438.000.000	438.000.000
	052	Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	3.560.700.000	361.560.000	1.618.660.000	790.240.000	790.240.000
	053	Pra Pradilan Kasus Tindak Pidana LHK	657.760.000	657.760.000	-	-	-
	054	Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400.000.000	400.000.000	-	-	-
TOTAL			**60.019.394.000**	**42.807.966.000**	**10.700.713.000**	**3.717.420.000**	**2.793.295.000**

OPERASI HASIL HUTAN ILLEGAL, DONGGALA SULAWESI - 06 AGUSTUS 2023

BAB III

PENUTUP

FIGHT AGAINST X-CRIME

KATA PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2024 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2023, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2024.

Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya dan keberhasilan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan) tahun 2020 s.d 2024, Rencana Strategi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan) tahun 2020 s.d 2024 serta Rencana Strategi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Perubahan) tahun 2020 s.d 2024, dengan hasil sesuai rencana yang diharapkan dan secara keseluruhan dapat mencapat target dan sasaran yang telah di tetapkan.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit Kinerja, sedangkan BPPHLHK Wilayah Sulawesi diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2024.

KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi

TAHUN 2024

Jl. Batara Bira No. 9 Baddoka,
Kelurahan Pai, Kec. Biringkanaya,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan